Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

# LAPORAN KINERJA 2017
## DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

# LAPORAN KINERJA

## DIREKTORAT JENDERAL

## PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

## TAHUN 2017

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017 dapat diselesaikan pada waktunya. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dirjen PKP) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017. Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran Dirjen PKP dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Dirjen PKP pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Kementerian PANRB dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Semoga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Jakarta,  Maret 2017

Plh. Direktur Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan

**Harlina Sulistyorini**

# DAFTAR ISI

*Halaman*


**KATA PENGANTAR** ..... iii
**DAFTAR ISI** ..... iv
**DAFTAR TABEL** ..... vi
**DAFTAR GAMBAR** ..... vii
**DAFTAR LAMPIRAN** ..... viii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **I-1**
A. Latar Belakang ..... I-1
B. Maksud dan Tujuan ..... I-3
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ..... I-4
D. Struktur Organisasi ..... I-4
E. Sumber Daya Manusia ..... I-6
F. Sistematika Penyajian Laporan ..... I-8

**BAB II PERENCANAAN KINERJA** ..... **II-1**
A. Rencana Strategis ..... II-1
1. Visi ..... II-1
2. Misi ..... II-1
3. Tujuan ..... II-2
4. Sasaran ..... II-3
5. Program dan Kegiatan ..... II-4
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ..... II-5

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** ..... **III-2**
A. Kategori Pengukuran Capaian Kinerja ..... III-1
B. Analisis dan Capaian Kinerja ..... III-1
1. Sasaran Program ..... III-5
2. Indikator Kinerja Utama ..... III-7
3. Target ..... III-10
4. Realisasi dan Capaian ..... III-12
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Organisasi ..... III-17
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan ..... III-17
2. Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan ..... III-23
3. Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan ..... III-24
4. Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan ..... III-25
5. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan III-26
6. Direktorat Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas . III-27

D. Akuntabilitas Keuangan ..... III-29
E. Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran ..... III-31
1. Faktor Pendukung ..... III-14
2. Tindaklanjut ..... III-14

**BAB IV PENUTUP ..... IV- 1**
A. Kesimpulan ..... IV- 1
B. Saran ..... IV- 2

**LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL

*Halaman*


Tabel 2.1 Sasaran Prioritas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019 ..... II-3

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017..... II-2

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 ..... II-6

Tabel 3.1 Kategori Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017..... III-1

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 .....III-3

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 ..... III-3

Tabel 3.4 Jenis Bantuan dan Alokasi Anggaran Dirjen PKP Tahun 2017..... III-6

Tabel 3.5 Tema Kawasan ..... III-10

Tabel 3.6 Sasaran Prioritas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019 ..... III-11

Tabel 3.7 Rekapitulasi Sebaran Lokasi dan Kegiatan Direktorat di Lingkungan Dirjen PKP ..... III-13

Tabel 3.8 Implementasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 ..... III-14

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kinerja untuk Penyampaian Laporan ..... III-10

Tabel 3.10 Capaian Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017. III-30

Tabel 3.11 Capaian Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja Direktorat Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017..... III-31

# DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen PKP ..... I-5

Gambar 3.1 Alur Proses Pembangunan Kawasan Perdesaan..... III-1

Gambar 3.2 Sebaran KPPN pada Lokasi Pusat Pertumbuhan dalam RPJMN 2015-2019..... III-2

# DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 ..... L-1

Lampiran 2 Implementasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 ..... L-3

Lampiran 3 Fasilitasi Rencana Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahun 2017 ..... L-5

Lampiran 4. Bantuan Program Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Pi Prukades) Tahun 2017 ..... L-11

Lampiran 5. Bantuan Pembangunan Pasar Kawasan di 13 Lokasi ..... L-13

Lampiran 6. Bantuan Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK) Tahun 2017 .. L-14

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita negara kesejahteraan dan mendistribusikan kesejahteraan secara merata, maka pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun pemerintah Desa memandang perlu untuk membuat terobosan pembangunan dari lingkup kewilayahan terkecil, yaitu desa. Pandangan dan upaya sistemik ini menjadi kebutuhan dan keharusan seiring dengan amanat implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak secara stimulan terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diberi mandat untuk mewujudkan cita ke-3 pada Nawacita yaitu: *"membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan",* merupakan langkah strategis untuk meletakan desa sebagai titik tumpu kemajuan Indonesia di masa mendatang.

Membangun kawasan perdesaan yang masih tertinggal memerlukan penanganan yang cermat, akurat, dan spesifik dibanding kawasan perkotaan yang telah maju. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang lebih bersifat keberpihakan, pemberdayaan, dan percepatan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai sosial kultural yang melekat pada masing-masing daerah tersebut, agar kebijakan yang akan diterapkan nantinya tidak akan merusak tatanan kehidupan masyarakat desa. Dengan perubahan pendekatan ini, maka pembangunan di desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut sebagai sebuah wilayah tersendiri. Desa harus dibangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang koheren, terencana dan terpadu dengan desa-desa yang lain sebagai sebuah kawasan yang satu dengan lainnya saling berinteraksi dan bersinergi. Pembangunan di desa sudah semestinya didorong dalam persepektif kawasan, sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat terwujud mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif.

Dalam melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dirjen PKP), sesuai tugas dan fungsinya telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi periode 2015-2019. Kebijakan, Program dan Kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahunan, baik tingkat lembaga (Menteri), unit organisasi (Eselon 1) dan satuan kerja (Eselon 2). Tahunan 2015 merupakan tahun pertama penjabaran Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2015-2019.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (*good governance*). Sejalan dengan hal tersebut, maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Dari tujuh azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres No. 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah dirumuskan sebelumnya.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 ini disusun sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan Kinerja Dijen PKP Tahun 2017 juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam mewujudkan *good governance*, transparansi informasi kepada publik, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi internal. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal

Pembangunan Kawasan Perdesaan secara keseluruhan menggambarkan kinerja dan tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pendayagunaan sumber daya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan selama tahun 2017.

Diharapkan dengan disusunnya LAPKIN Dirjen PKP Tahun 2017 akan dapat meningkatkan optimalisasi, efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun-tahun selanjutnya.

## B. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2017 adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan atas kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017.
2. Memberikan gambaran dan informasi mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan program/kebijakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan atau tingkat kegagalan capaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017.

Adapun tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 adalah :

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Tahun 2017;
2. Memberikan umpan balik *(feed back)* bagi peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;
3. Dihasilkan suatu umpan balik bagi pengambilan kebijakan strategik dan peningkatan kinerja perencanaan program/kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017;
4. Terlaksananya sasaran penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan; dan
5. Terlaksananya kegiatan program kerja secara efisien, efektif dan responsif serta tanggap terhadap kondisi Pembangunan Kawasan Perdesaan di daerah.

## C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, dalam BAB VI pasal 245 disebutkan bahwa, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan menjalankan serangkaian fungsi, meliputi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## D. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai Struktur organisasi sesuai Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

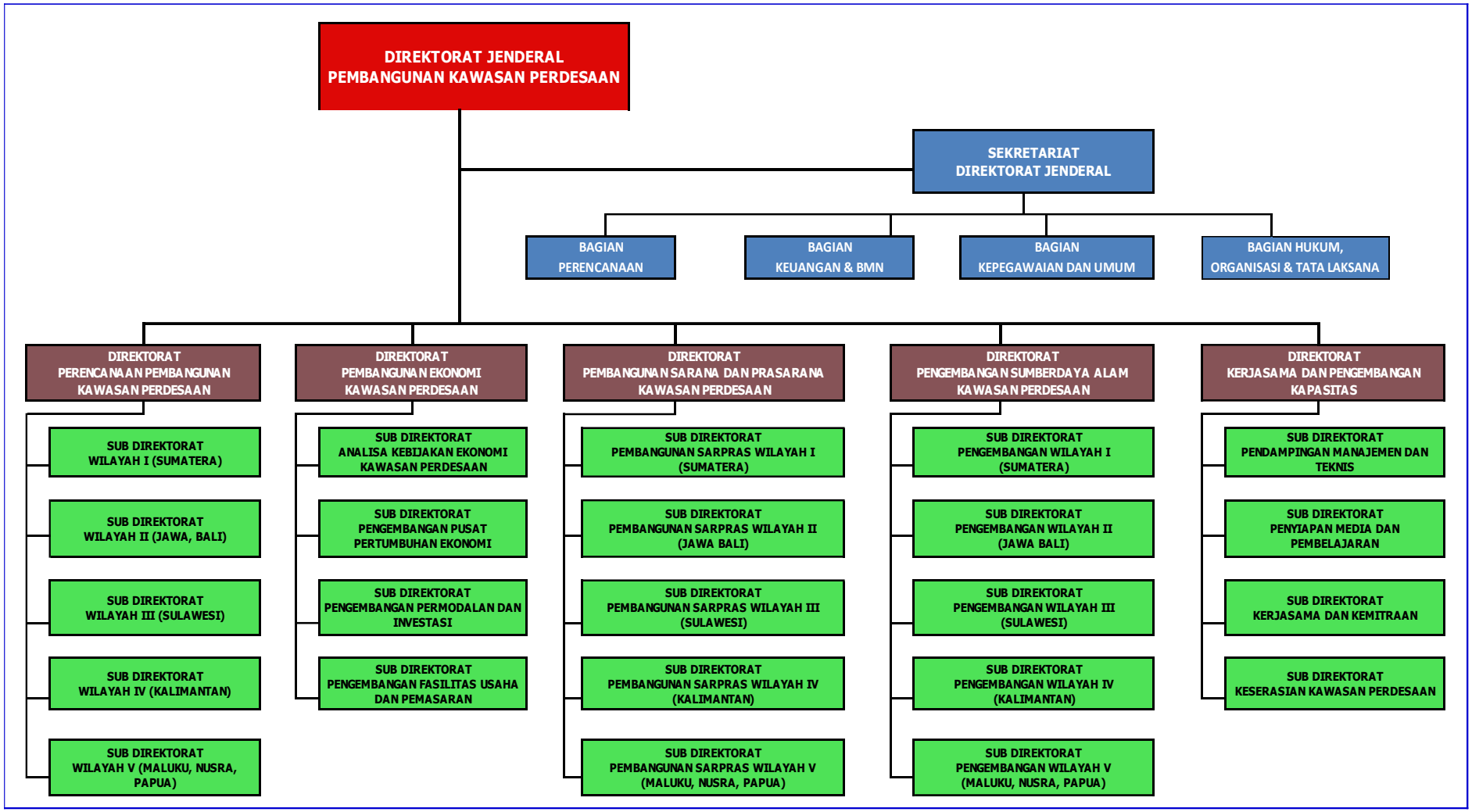


Gambar 1-1

**Struktur Organisasi Ditjen PKP**

Berdasarkan struktur di atas, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri atas :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal; yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;
2. Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan,Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
3. Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan; yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran.
4. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan; yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana wilayah Sumatera, Jawa,Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
5. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan; yang diberi tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
6. Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas. yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerjasama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan.

## E. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Dengan sistem organisasi yang mencakup semua fungsi direktorat, sumber daya manusia Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan perlu menyesuaikan diri baik sisi kualitas maupun bidang penguasaannya.

Pada tahun 2017, jumlah personil Dirjen PKP mencapai 314 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara sebanyak 122 orang (38,9%) dan Non ASN sebanyak 192 orang (61,2%). Kualitas sumber daya manusia Dirjen PKP yang berstatus ASN relatif cukup baik, tercermin dari tingkat pendidikan setara magister atau lebih tinggi sebanyak 48 pegawai dari 122 total pegawai ASN (38,3%). Mayoritas ASN berpendidikan Sarjana sebanyak 49,3% (59 orang). Sedangkan secara umum, baik ASN maupun Non ASN, rata-rata tingkat pendidikannya adalah Sarjana sebayak 222 dari 314 total pegawai (70,7%).

Sedangkan ditinjau dari jabatannya, jumlah personil terbanyak berada di Eselon IV sebanyak 62 orang atau 50,8%, disusul Eselon III sebanyak 27 orang atau 22,1%. Komposisi berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel berikut.

1. Berdasarkan Jabatan:

| UNIT KERJA | ESELON | | | | JFU | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | | |
| Dirjen PKP | 1 | | | | | 1 |
| Sesditjen PKP | | 1 | 4 | 11 | 5 | 21 |
| Dit. Perencanaan | | 1 | 5 | 11 | 3 | 20 |
| Dit. Ekonomi | | 1 | 4 | 9 | 6 | 20 |
| Dit. Sarpras | | 1 | 5 | 11 | 4 | 21 |
| Dit. SDA | | 1 | 5 | 11 | 6 | 23 |
| Dit. KSPK | | 1 | 4 | 9 | 2 | 16 |
| **JUMLAH** | **1** | **6** | **27** | **62** | **26** | **122** |
| **Prosentase** | **0,8** | **4,9** | **22,1** | **50,8** | **21,3** | **100** |

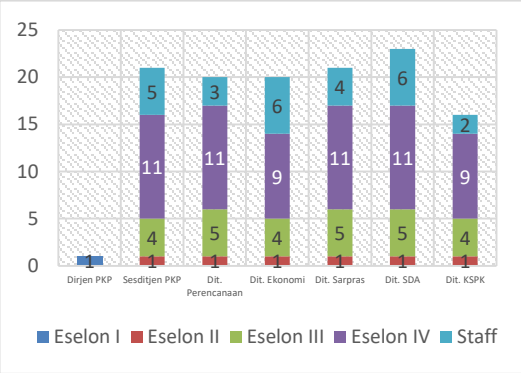


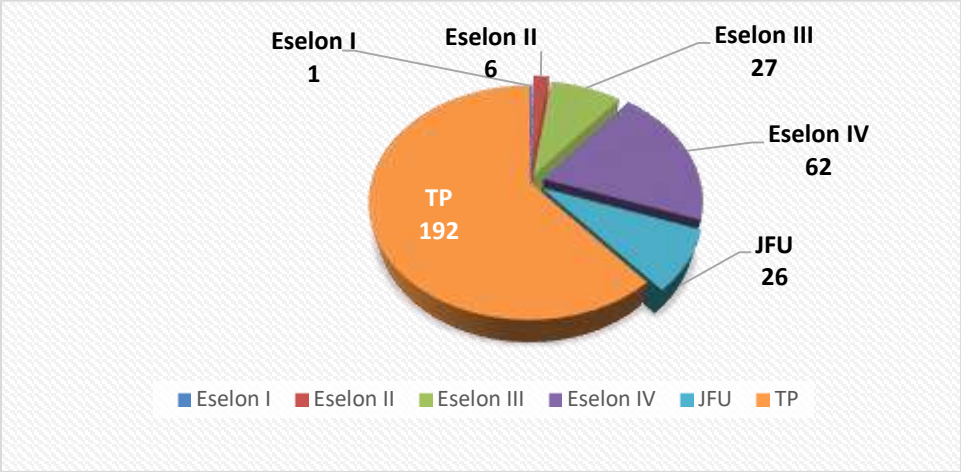

2. Berdasarkan Jenis Pendidikan:

| NO | PENDIDIKAN | ASN | NON-ASN | Jumlah | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strata 3 (S-3) | 2 | - | 2 | 0,64% |
| 2 | Strata 2 (S-2) | 46 | - | 46 | 14,65% |
| 3 | Strata 1 (S-1) | 59 | 163 | 222 | 70,70% |
| 4 | Diploma 3 (D-3) | 1 | 8 | 9 | 2,87% |
| 5 | Diploma 1 (D-1) | 1 | 1 | 2 | 0,64% |
| 6 | SMA/SMK | 13 | 20 | 33 | 10,51% |
| 7 | SMP | - | - | - | - |
| 8 | Sekolah Dasar (SD) | - | - | - | - |
| | **JUMLAH** | **122** | **192** | **314** | **100,0%** |

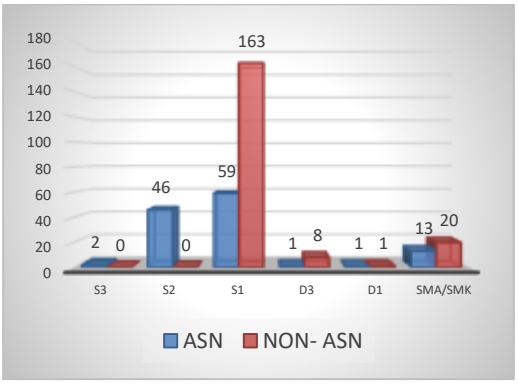


## F. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan,** terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, serta sistematika penyajian laporan.
2. **Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,** terdiri dari Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja,** terdiri dari pengukuran capaian kinerja, evaluasi capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan.
4. **Bab IV Penutup,** bab ini memuat ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 yang dirangkum ke dalam kesimpulan dan saran terhadap Akuntabilitas Kinerja.

*****

# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, serta sarana/prasarana kerja yang memadai. Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 dan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi.

### 1. Visi

Visi Presiden yang menjadi Visi Kementerian/Lembaga dan unit kerja di dalamnya, yaitu: terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Selain Visi Presiden, Visi Ditjen PKP secara khusus adalah untuk mewujudkan pembangunan Kawasan Perdesaan yang memiliki kualitas pelayanan terbaik, pengembangan ekonomi yang berdaulat dan pemberdayaan masyarakat yang sejahtera.

### 2. Misi

Misi Presiden yang menjadi misi Kementerian/Lembaga dan unit kerja termasuk di dalamnya kelembagaan Ditjen PKP. Misi Presiden mencakup enam (6) hal, yaitu:

a) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan;
b) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
c) Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
d) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
e) Mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
f) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka pelaksanaan Visi dan Misi tersebut di atas, Presiden juga memiliki sembilan (9) Agenda Strategis Prioritas atau dikenal dengan istilah Nawacita. Nawacita yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, khususnya Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Nawacita ketiga yang berbunyi: *Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan*.

Selain Misi Presiden dan Nawacita di atas, secara khusus misi Ditjen PKP diprioritaskan pada pemerataan pembangunan dan/atau diikuti dengan pertumbuhan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerataan menjadi misi yang menjadi prioritas utama Ditjen PKP dikarenakan target peningkatan jumlah kawasan perdesaan yang termasuk di dalamnya juga peningkatan jumlah desa mandiri maupun desa berkembang.

### 3. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden serta ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka tujuan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yaitu: mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Secara khusus dipertegas lebih rinci dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan disebutkan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui

pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada Kawasan Perdesaan.

## 4. Sasaran

Mengacu kepada Sasaran RPJMN 2015-2019, maka Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Selain itu, Dirjen PKP juga diamanahi untuk meningkatkan keterkaitan Desa-Kota melalui pembangunan ekonomi hulu-hilir dan pengelolaan kawasan perdesaan untuk mempercepat kemandirian desa. Sasaran lokasi prioritas peningkatan keterkaitan kota-desa untuk memperkuat pusat pertumbuhan adalah 39 Kawasan Pusat Pertumbuhan Baru yang meliputi 60 kabupaten. Belakangan istilah Pusat Pertumbuhan Baru ini diganti dengan istilah Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) berdasarkan konsensus antara Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Bappenas.

Pada tahun 2017 sasaran yang ditargetkan berjumlah 14 KPPN dari 39 KPPN yang menjadi target dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Pada tahun sebelumnya, tahun 2016 juga ditargetkan 14 pusat pertumbuhan atau kawasan perdesaan dan ekonomi kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri sesuai dengan RPJMN 2015-2019. Sasaran Prioritas Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 2.1**
**Sasaran Prioritas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019**

| Sasaran | Baseline (2014) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang | -- | 500 desa | 1.500 desa | 3.000 desa | 4.500 desa | 5.000 desa |
| Peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri | -- | 200 desa | 600 desa | 1.200 desa | 1.800 desa | 2.000 desa |
| **Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota dan ekonomi kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri *)** | -- | 14 Kaw | | 28 Kaw | 39 Kaw | 39 Kaw |
| Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa berkembang | | 14 Kaw/ 7 SP | 43 Kaw/ 22 SP | 86 Kaw/ 43 SP | 130 Kaw/ 65 SP | 144 Kaw/ 72 SP |

## 5. Program dan Kegiatan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Program disusun dalam kerangka strategi nasional dan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan nasional yang menggambarkan kontribusi dari pelaksanaan pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Program Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mendukung kebijakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan hanya ada 1 (satu) yaitu: Program Pembangunan Kawasan Perdesaan.

*Outcome* yang diharapkan dari program Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah: Terwujudnya percepatan dan peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kawasanperdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setiap Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam restrukturisasi program dan kegiatan, setiap unit kerja Eselon II memiliki akuntabilitas kinerja untuk satu kegiatan. Kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan disinergikan dengan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Eselon II di bawahnya yang mencakup enam kegiatan dalam menunjang tupoksinya yaitu:

a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan
b. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
c. Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan
d. Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan
e. Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan
f. Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas

Seluruh program kegiatan dari masing-masing direktorat difokuskan untuk mewujudkan tiga tujuan Ditjen PKP yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Tiga tujuan ini menjadi basis dari penetapan arah kebijakan Ditjen PKP yang mencakup *service, economy and empowerment*. Selanjutnya masing-masing kegiatan disinkronkan dengan kegiatan Prioritas Kementerian sesuai Instruksi Menteri nomor 1 Tahun 2017 tentang Prioritas Kegiatan Kementerian. Kegiatan Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdiri dari 4 kegiatan, yaitu:

1) Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades)
2) Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
3) Embung
4) Sarana Olah Raga Desa (Raga Desa)

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perjanjian Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan memuat rencana kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2017 sekaligus sebagai ukuran keberhasilan unit kerja yang menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran 2017.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan berisikan penugasan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah, kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja tahun 2017 telah selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.2**
**Perjanjian Kinerja**
**Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (termasuk pada wilayah Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur) | Jumlah kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan pada lokus sesuai dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan | 14 Kawasan |

Pencapaian target program didukung oleh kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Target pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah target sekretariat dan setiap direktorat yang ada di bawah Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Adapun target pencapaian indikator kinerja kegiatan TA 2017 pada setiap direktorat dan sekretariat sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja masing-masing Unit Eselon II adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**
**Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon II**
**Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017**

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target |
|---|---|---|---|
| I | **SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN** | | |
| 1 | Peningkatan kinerja akuntabilitas | Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PKP berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) | 4 (Memuaskan) |
| | | Nilai SAKIP | 65 |
| | | Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKP yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan | 100 (Persentase) |
| 2 | Peningkatan kompetensi ASN | Persentase ASN di lingkungan Ditjen PKP yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun | 9 (Persentase) |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target |
|---|---|---|---|
| | | Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PKP | 88 |
| 3 | Peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran Ditjen PKP | Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKP | 82 |
| | | Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Ditjen PKP | 91 (Persentase) |
| | | Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Ditjen PKP | 3 (Kali) |
| **II** | **DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN** | | |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan | Jumlah dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan | 10 (Dokumen) |
| | | Persentase dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang diimplementasikan | 100% (60 Dok) |
| **III** | **DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN PERDESAAN** | | |
| 1 | Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong Pusat pertumbuhan kawasan | Persentase kegiatan pengembangan ekonomi di kawasan perdesaan | 60 (Persentase) |
| **IV** | **DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERDESAAN** | | |
| 1 | Peningkatan prasarana dan sarana ekonomi dan pelayanan dasar di kawasan perdesaan | Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana ekonomi kawasan perdesaan | 65 (Persentase) |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar kawasan perdesaan | 65 (Persentase) |
| **V** | **DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM KAWASAN PERDESAAN** | | |
| 1 | Pengembangan sumber daya alam di kawasan perdesaan | Jumlah potensi sumber daya alam unggulan yang terpetakan untuk pengembangan kawasan perdesaan | 10 (Kawasan) |
| 2 | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan di Kawasan Perdesaan | Persentasetase kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan perdesaan dengan pendekatan berkelanjutan (sustainable) | 10 (Persentase) |
| **VI** | **DIREKTORAT KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS** | | |
| 1 | Pengembangan kawasan perdesaan melalui peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas | Jumlah Kawasan Perdesaan yang melakukan Kerjasama dan kemitraan | 20 (Kawasan) |
| | | Jumlah kawasan perdesaan yang mendapatkan pendampingan | 60 (Kawasan) |

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Kategori Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja utama dengan capaian kinerja nyata (realisasi) melalui penilaian sendiri (*self assessment*). Pengukuran dilakukan guna mengetahui capaian kinerja organisasi untuk dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja institusi. Pengukuran capaian kinerja beserta indikatornya menggunakan rentang penilaian capaian kinerja dan kategori capaian pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.1**
**Kategori Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017**

| No. | Rentang Capaian Kinerja | Kategori Capaian Kinerja |
|---|---|---|
| 1. | 85 % - 100 % | Sangat Baik |
| 2. | 70 % - 84 % | Baik |
| 3. | 55 % - 69 % | Sedang |
| 4. | < 55 % | Kurang |

*Sumber: Modifikasi Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAN Tahun 2000*

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah menetapkan indikator kinerja utama yang digunakan untuk menginformasikan kinerja, baik berupa *output* maupun *outcome*.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan juga kriteria SMART sebagai akronim dari *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan), dan *timebound* (memiliki batas waktu). Pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2017 menggunakan indikator kinerja yang terdapat di dalam Penetapan Kinerja dan juga menggunakan aplikasi Metode Penerapan PP No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan upaya untuk menjawab dan memenuhi

tantangan dan kebutuhan dalam rangka melaksanakan siklus manajemen pembangunan secara utuh.

## B. Analisis dan Capaian Kinerja

Pada tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis Dirjen PKP Tahun 2015-2019. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Berdasarkan perjanjian kinerja Dirjen PKP mempunyai 1 (satu) Sasaran Strategis dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 (Tabel 3.2).

Tugas dan fungsi Dirjen PKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2017 yaitu untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada Kawasan Perdesaan.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian Indikator Kinerja Utama menggambarkan capaian indikator outcome. Dengan demikian, penilaian capaian kinerja Dirjen PKP merupakan agregat dari capaian kinerja pada Unit Kerja Eselon I. Untuk mengukur indikator kinerja, penilaian dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap aspek program, sasaran, kegiatan, dan indikator yang termuat dalam RPJMN, RKP, Renja K/L, dan RKA K/L. Adapun rincian capaian kinerja Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan disajikan pada Tabel 3.2

**Tabel 3.2**
**Pencapaian Kinerja**
**Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017**

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (termasuk pada wilayah Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur) | Jumlah kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan pada lokus sesuai dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan | 14 Kawasan | 30 Kawasan | 100% |

Pencapaian target program didukung oleh kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Target pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah target sekretariat dan setiap direktorat yang ada di bawah Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 14 kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan pada lokus sesuai dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan, Ditjen PKP telah dapat mengimplementasikan kegiatan di 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan atau lebih dari 100%. Adapun target pencapaian indikator kinerja kegiatan TA 2017 pada setiap direktorat dan sekretariat sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja masing-masing Unit Eselon II adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**
**Pencapaian Kinerja Unit Kerja Eselon II**
**Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017**

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN** | | | |
| 1 | Peningkatan kinerja akuntabilitas | Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PKP berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) | 4 (Memuaskan) | 4 (Memuaskan) |
| | | Nilai SAKIP | 65 | 67 |
| | | Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKP yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan | 100 (Persentase) | 100 (Persentase) |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Peningkatan kompetensi ASN | Persentase ASN di lingkungan Ditjen PKP yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun | 9 (Persentase) | 16 (Persentase) |
| | | Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PKP | 88 | 93,5 |
| 3 | Peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran Ditjen PKP | Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKP | 82 | 76,31 |
| | | Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Ditjen PKP | 91 (Persentase) | 91 (Persentase) |
| | | Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Ditjen PKP | 3 (Kali) | 5 (Kali) |
| **II** | **DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN** | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan | Jumlah dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan | 10 (Dokumen) | 12 (Dokumen) |
| | | Persentase dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang diimplementasikan | 100% (60 Dok) | 125% (75 Dok) |
| **III** | **DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN PERDESAAN** | | | |
| 1 | Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong Pusat pertumbuhan kawasan | Persentase kegiatan pengembangan ekonomi di kawasan perdesaan | 60 (Persentase) | 75 (Persentase) |
| **IV** | **DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERDESAAN** | | | |
| 1 | Peningkatan prasarana dan sarana ekonomi dan pelayanan dasar di kawasan perdesaan | Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana ekonomi kawasan perdesaan | 65 (Persentase) | 122 (Persentase) |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar kawasan perdesaan | 65 (Persentase) | 100 (Persentase) |
| **V** | **DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM KAWASAN PERDESAAN** | | | |
| 1 | Terkembangkan dan termanfaat-kannya potensi sumber daya alam unggulan kawasan perdesaan dengan pendekatan berbasis lingkungan hidup berkelanjutan | Jumlah kawasan perdesaan yang potensi sumber daya alam unggulannya dikembangkan dan dimanfaatkan dengan pendekatan berbasis lingkungan hidup berkelanjutan | 10 (Kawasan) | 10 (Kawasan) |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| **VI** | **DIREKTORAT KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS** | | | |
| 1 | Pengembangan kawasan perdesaan melalui peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas | Jumlah Kawasan Perdesaan yang melakukan Kerjasama dan kemitraan | 20 (Kawasan) | 21 (Kawasan) |
| | | Jumlah kawasan perdesaan yang mendapatkan pendampingan | 60 (Kawasan) | 60 (Kawasan) |

**1. Sasaran Program**

Sasaran Program dalam dokumen Penetapan Kinerja adalah: *Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (termasuk pada wilayah Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur).* Berdasarkan Buku I RPJMN 2015-2019, disebutkan bahwa Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

Disamping itu, sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 halaman IV-78, disebutkan bahwa Sasaran Prioritas Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah *Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota dan ekonomi kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri*. Sasaran pada akhir tahun 2019 adalah 39 kawasan, sedangkan target pada tahun 2017 adalah 14 kawasan.

Dalam rangka mencapai sasaran target sesuai amanat dalam RPJMN 2015-2019, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mendukung prioritas kegiatan Kementerian yang meliputi 4 kegiatan prioritas, yaitu : 1) Prukades; 2) BUMDes/BUMDes Bersama; 3) Embung; dan 4) Sarana Olah Raga Desa (Raga Desa).

Kegiatan yang telah dilaksanakan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, difokuskan untuk mewujudkan tiga tujuan Ditjen PKP yaitu : 1) meningkatkan pelayanan publik; 2) pembangunan ekonomi; dan 3) pemberdayaan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 83 ayat (3), Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

1. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
2. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
3. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan

4. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan, Ditjen PKP pada tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**
**Jenis Bantuan dan Alokasi Anggaran Dirjen PKP Tahun 2017**

| No | Jenis Bantuan | Jumlah | | Alokasi (Rp.) |
|---|---|---|---|---|
| | | Vol | Satuan | |
| 1 | Pembangunan Jalan Poros antar Desa | 34 | Paket | 37.530.600.000 |
| 2 | Pembangunan Embung | 22 | Paket | 20.243.000.000 |
| 3 | Sarana dan Prasarana Air Bersih | 11 | Paket | 6.456.000.000 |
| 4 | Pembangunan Pasar Kawasan | 13 | Paket | 12.695.287.000 |
| 5 | Pengembangan Inkubator Prukades | 15 | Paket | 3.900.000.000 |
| 6 | Pembangunan Rice Milling Unit | 21 | Paket | 22.388.000.000 |
| 7 | Bantuan Mesin Pengolahan Biji Kakao | 1 | Paket | 1.038.000.000 |
| 8 | Bantuan Mesin Penggiling Kopi | 6 | Paket | 6.186.000.000 |
| 9 | Pengembangan Pariwisata Terpadu | 13 | Paket | 12.905.000.000 |
| 10 | Pembangunan Pabrik Es Mini | 8 | Paket | 2.086.172.000 |
| 11 | Pembangunan Keramba Jaring Apung | 2 | Paket | 2.086.172.000 |
| 12 | Pembangunan Pabrik Pakan Ikan Mini | 5 | Paket | 5.189.000.000 |
| 13 | Bantuan Modal UBK | 30 | Paket | 2.250.000.000 |
| 14 | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 30 | Paket | 7.980.000.000 |
| 15 | Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dalam Pengembangan Usaha | 3 | paket | 1.050.000.000 |
| 16 | Pengembangan Bio Gas dan Kotoran Ternak Menjadi Pupuk dan Biourine | 2 | paket | 1.891.000.000 |
| **Jumlah Total** | | | | **145.874.231.000** |

Ke-16 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 seperti tersebut di atas tersebar **di 27 provinsi meliputi 115 kabupaten, 115 kawasan, yang terdiri dari 412 desa.** Dalam satu kawasan atau kabupaten yang diintervensi bisa jadi terdiri dari 1 atau lebih kegiatan.

Sedangkan untuk mendukung prioritas kegiatan Kementerian yang meliputi 4 kegiatan prioritas, sinkronisasi kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (**Prukades**), untuk meningkatkan skala ekonomi berbasis Teknologi & Inovasi ;

a. Pembangunan Pasar Kawasan di 13 Kawasan
b. Pembangunan Jalan Antar Desa sepanjang 37 Km
c. Bantuan Peralatan Pengolahan Pasca Panen dan Pengembangan Pariwisata Terpadu
d. Pendampingan Manajemen dan Teknis.

2) Pembentukan/Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (**BUMDes/BUMDes Bersama)**, untuk kemandirian ekonomi desa ;
   a. Bantuan PI PRUKADES berbasis UBK di 30 Kawasan
   b. Bantuan Pengembangan Inkubator PRUKADES di 15 Kawasan
   c. Fasilitasi Multi Pihak (BUMN/BUMD/Swasta/Perguruan Tinggi)
   d. Pendampingan Manajemen dan Teknis

3) Pembangunan **Embung**, untuk ketahanan pangan ;
   a. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Sebanyak 22 Unit

4) Sarana Olah Raga Desa (**Raga Desa**) untuk kohesi sosial ;
   Kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana olah raga desa, tidak dialokasikan di Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## 2. Indikator Kinerja Utama

Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama dalam Penetapan Kinerja Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah: *Jumlah kawasan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan pada lokus sesuai dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan*.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dengan disahkannya UU Desa memberikan harapan dan peluang bagi Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong mempercepat pembangunannya. Desa menjadi titik simpul terkecil pembangunan, sehingga mendinamisasikan pembangunan di desa akan memberikan dampak terhadap pembangunan pada lingkup kewilayahan yang lebih luas.

Konsekuensinya, pembangunan di desa tidak seharusnya hanya berfokus pada keberadaan desa tersebut.Desa harus dibangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang koheren, terencana, dan terpadu, sehingga diperlukan

perencanaan dan penetapan pembangunan kawasan perdesaan. Dengan demikian, pembangunan di desa didorong dalam perspektif kawasan sehingga akselerasi pembangunan dapat lebih cepat, mengingat potensi dan permasalahan desa dapat terpetakan dan diselesaikan dalam perspektif yang lebih komprehensif.

Pelaksanaan pembangunan dalam satuan kawasan perdesaan sebetulnya sudah banyak dilakukan jauh sebelum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 lahir. Beberapa model atau bentuk kegiatan pembangunan kawasan perdesaan telah diperkenalkan oleh beberapa kementerian/lembaga di beberapa kabupaten/kota terpilih, diantaranya:

- PKPBM : Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat, yang menginisiasi 54 kawasan perdesaan di 54 kabupaten oleh Kementerian Dalam Negeri;
- P2KPB : Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan, yang mencakup 28 kabupaten oleh Kementerian PUPR yang selanjutnya ditangani oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang namun belakangan diserahkan penangannnya kepada Kementerian Desa, PDTT;
- KTM : Kota Terpadu Mandiri, meliputi 48 kabupaten oleh Dirjen Transmigrasi Kementerian Desa, PDTT;
- Kawasan Pusat Pertumbuhan baru – Keterkaitan Kota Desa, terdiri dari 40 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), yang tersebar di 60 kabupaten yang tercantum dalam Buku III RPJMN 2015-2019;
- Kawasan Agropolitan, kawasan yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian;
- Kawasan Minapolitan; kawasan-kawasan pesisir yang difasilitasi pengembangannya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kawasan-kawasan lain yang diusulkan oleh pemerintah daerah secara mandiri yang jumlahnya terus bertambah. Hingga saat ini sudah mencapai 693 kawasan usulan daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan turut menangani dan mengkoordinasikan Kawasan Perdesaan secara sinergis, dengan pola-pola pembangunan kawasan perdesaan yang sudah ada sebelumnya, dan mengawal terwujudnya spirit partisipatif seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Pasal 3 menegaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi,

dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Adapun pembangunan kawasan perdesaan tersebut diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Kata Pembangunan dalam frasa Pembangunan Kawasan Perdesaan ditulis dalam huruf "P" besar untuk mengindikasikan sebagai sebuah kesatuan sistemik yang terdiri dari beberapa tahap yang berkesinambungan. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 5 Tahun 2015 menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan sebuah mekanisme pembangunan yang menyakup 4 tahap yang terintegrasi satu dengan yang lain. Keempat tahap yang dimaksud adalah: a. Pengusulan Kawasan Perdesaan; b. Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan; c. Pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, dan; d. Pelaporan serta evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan (Gambar 10).

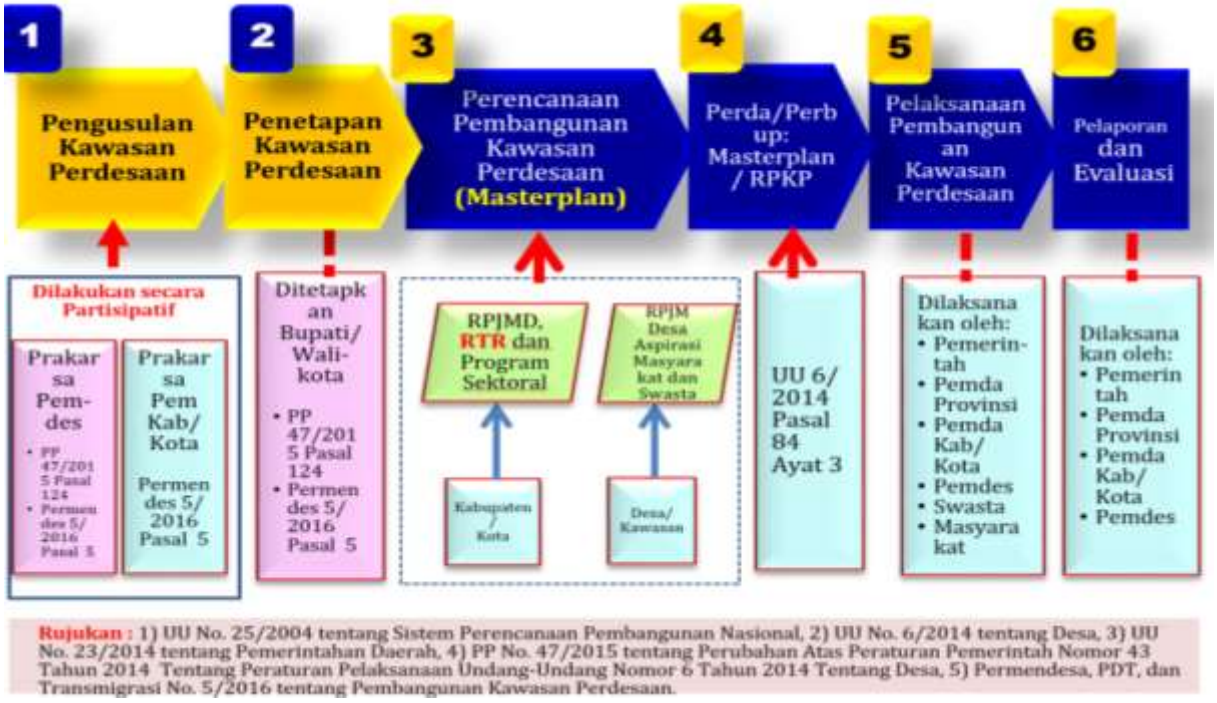


**Gambar 3.1. Alur Proses Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Sejak tahun 2015, Dirjen PKP telah memberikan fasilitasi kepada pemerintah daerah untuk menyusun kawasan perdesaan di wilayah masing-masing. Pada tahun 2015 terdapat 72 kabupaten yang difasilitasi, demikian pula pada tahun 2016 Dirjen PKP telah menghasilkan penetapan Kawasan Perdesaan terpilih berdasarkan potensi lokal yang berlandaskan kajian ilmiah dan akademis di 72 kabupaten.

Fasilitasi selama 2015-2016 telah menghasilkan penyusunan Rencana Aksi pembangunan kawasan perdesaan berupa dokumen RPKP (Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan) yang meliputi 150 kawasan.

Hingga saat ini Kawasan Perdesaan Tematik yang ada dalam Data Base Kementerian Desa berjumlah 941 Kawasan tersebar di 261 kabupaten/kota seluruh Indonesia dengan berbagai macam tema/potensi unggulan. Pengelompokan tema kawasan terbanyak adalah bidang agribisnis disusul tema pariwisata. Rincian tema kawasan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**
**Tema Kawasan**

| No | Tema Kawasan | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Agribisnis | 472 | 50,2 |
| 2 | Pariwisata | 162 | 17,2 |
| 3 | Minapolitan | 141 | 15,0 |
| 4 | Transmigrasi | 86 | 9,1 |
| 5 | Home Industri | 25 | 2,7 |
| 6 | Kehutanan | 27 | 2,9 |
| 7 | Pertambangan | 15 | 1,6 |
| 8 | Industri | 13 | 1,4 |
| | **JUMLAH TOTAL** | **941** | **100,0** |

Mengingat banyaknya kawasan perdesaan yang diusulkan, sedangkan alokasi anggaran Dirjen yang terbatas, maka perlu adanya skala prioritas pemberian bantuan/ fasilitasi ke kawasan perdesaan. Beberapa ketentuan terkait pemilihan lokasi fasilitasi adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Lokasi KPPN yang telah ditetapkan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 (Perpres Nomor 2 Tahun 2015)
- Berdasarkan RPKP yang telah disusun, sesuai Pasal 124 PP 47 Tahun 2014 tentang Perubahan PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
- Proporsi wilayah (keterwakilan pulau, KTI & KBI)

Dengan demikian yang menjadi ukuran keberhasilan adalah Jumlah kawasan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan pada lokus sesuai dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan dan sesuai dengan lokasi KPPN yang telah ditetapkan dalam Buku III RPJMN 2015-2019.

### 3. Target

Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik, yang akan dicapai oleh K/L, program dan kegiatan dalam periode waktu tertentu. Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap

indikator sasaran. Penetapan target juga harus relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Sasaran yang harus dicapai oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam lima tahun ke depan adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Dengan mengacu pada sasaran tersebut, Ditjen PKP telah menetapkan Sasaran outcome program Pembangunan Kawasan Perdesaan, adalah: terbangunnya pusat pertumbuhan kawasan.

Target Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana Sasaran Prioritas Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019 dan tercantum dalam Perpres No. 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 (Hal. IV-78) disajikan pada Tabel 3.6, sedangkan sebaran Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) pada Lokasi Pusat Pertumbuhan dalam RPJMN 2015-2019 dan Lokasi Kegiatan adalah sebagai berikut disajikan pada Gambar 3.1.

**Tabel 3.6**
**Sasaran Prioritas Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam RPJMN 2015-2019**

| Sasaran | Baseline (2014) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang | -- | 500 desa | 1.500 desa | 3.000 desa | 4.500 desa | 5.000 desa |
| Peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri | -- | 200 desa | 600 desa | 1.200 desa | 1.800 desa | 2.000 desa |
| **Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota dan ekonomi kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri *)** | -- | 14 Kaw | | 28 Kaw | 39 Kaw | 39 Kaw |
| Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa berkembang | | 14 Kaw/ 7 SP | 43 Kaw/ 22 SP | 86 Kaw/ 43 SP | 130 Kaw/ 65 SP | 144 Kaw/ 72 SP |

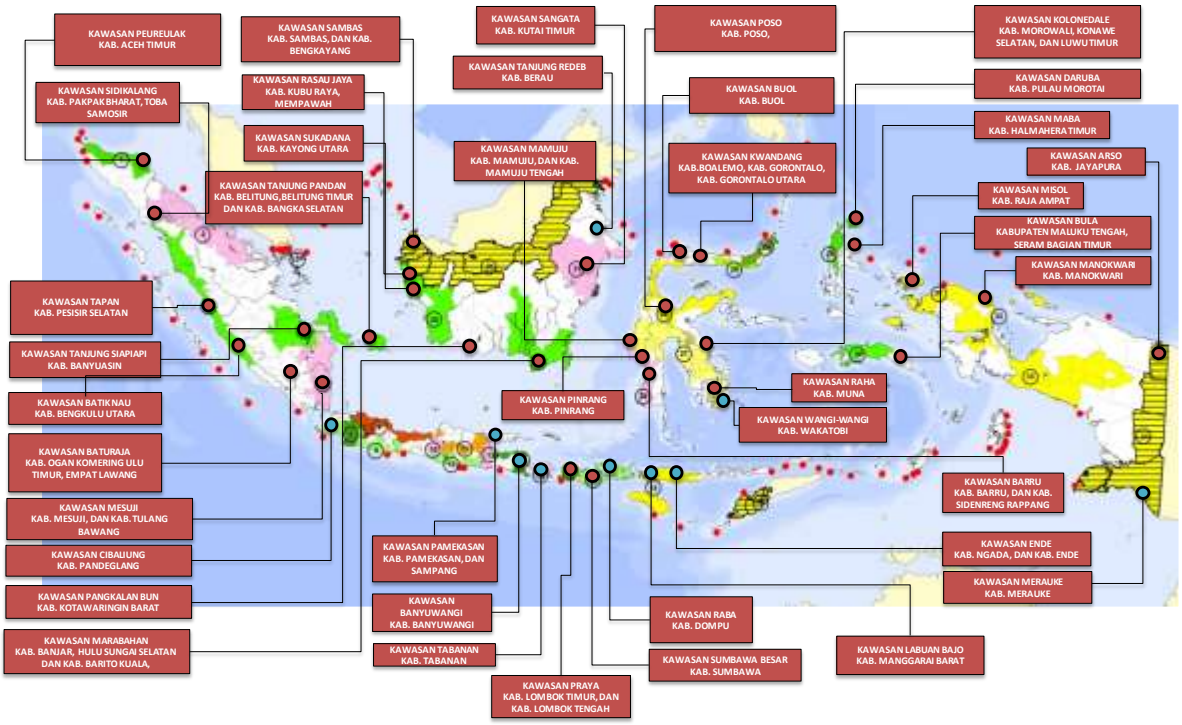


Gambar. 3.2

Sebaran KPPN pada Lokasi Pusat Pertumbuhan dalam RPJMN 2015-2019

## 4. Realisasi dan Capaian

*Output* atau keluaran kegiatan pada hakekatnya merupakan wujud dari pelaksanaan suatu program, sehingga keluaran dari kegiatan tersebut seharusnya berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran dan outcome program. Keterkaitan *output* dan *outcome* program diperlukan dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), sistem perencanaan dan penganggaran maupun dalam evaluasi kinerja program berlandaskan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Output dari Program Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Kawasan Perdesaan yang difasilitasi penetapan dan pengembangannya.

Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh Direktorat di lingkungan Dirjen PKP, terdapat 294 kegiatan yang terealisir yang tersebar **di 27 provinsi meliputi 115 kabupaten, 115 kawasan, yang terdiri dari 412 desa**. Jenis Kegiatan dan sebaran lokasi berdasarkan KPPN dan Non KPPN disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.7**
**Rekapitulasi Sebaran Lokasi dan Kegiatan Direktorat di Lingkungan Dirjen PKP**

| No | KEGIATAN | ∑ Kawasan | KPPN | Non KPPN | ∑ Desa | ∑ Kab. | ∑ Prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Jalan Poros antar Desa | 34 Kawasan | 11 | 23 | 36 Desa | 34 Kab. | 17 Prov |
| 2 | Pembangunan Embung | 22 Kawasan | 5 | 17 | 23 Desa | 22 Kab. | 17 Prov |
| 3 | Sarana dan Prasarana Air Bersih | 11 Kawasan | 4 | 7 | 15 Desa | 11 Kab. | 7 Prov |
| 4 | Pembangunan Pasar Kawasan | 13 Kawasan | 0 | 13 | 13 Desa | 13 Kab. | 7 Prov |
| 5 | Pengembangan Inkubator PRUKADES | 45 Kawasan | 7 | 5 | 75 Desa | 45 Kab. | 18 Prov |
| 6 | Pembangunan Rice Milling Unit | 20 Kawasan | 5 | 15 | 111 Desa | 21 Kab. | 14 Prov |
| 7 | Bantuan Mesin Pengolahan Biji Kakao | 1 Kawasan | 0 | 1 | 4 Desa | 1 Kab. | 1 Prov |
| 8 | Bantuan Mesin Penggiling Kopi | 6 Kawasan | 2 | 4 | 27 Desa | 6 Kab. | 5 Prov |
| 9 | Pengembangan Pariwisata Terpadu | 13 Kawasan | 5 | 8 | 67 Desa | 13 Kab. | 10 Prov |
| 10 | Pembangunan Pabrik Es Mini | 8 Kawasan | 3 | 5 | 22 Desa | 7 Kab. | 6 Prov |
| 11 | Pembangunan Keramba Jaring Apung | 2 Kawasan | 2 | 0 | 16 Desa | 2 Kab. | 2 Prov |
| 12 | Pembangunan Pabrik Pakan Ikan Mini | 5 Kawasan | 2 | 3 | 31 Desa | 5 Kab. | 4 Prov |
| 13 | Bantuan Modal UBK | 30 kawasan | 3 | 27 | 60 Desa | 30 Kec. | 8 Prov |
| 14 | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 30 kawasan | 3 | 27 | 60 Desa | 30 Kec. | 8 Prov |
| 15 | Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin dalam Pengembangan Usaha | 3 Kawasan | 2 | 1 | 3 Desa | 3 Kec | 3 Prov |
| 16 | Pengembangan Bio Gas dan Kotoran Ternak Menjadi Pupuk dan Biourine | 2 Kawasan | 0 | 2 | 2 Desa | 2 Kec | 2 Prov |

Namun, sebaran jumlah lokasi kegiatan tersebut ternyata belum seluruhnya merupakan lokasi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Dari jumlah tersebut, terdapat **75 kabupaten yang memiliki dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan**. Dari jumlah tersebut, **30 diantaranya adalah lokasi KPPN**, dan **42 kabupaten sudah memiliki RPKP** serta 2 kabupaten merupakan lokasi kabupaten yang mendapat fasilitasi penyusunan Rencana Induk dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Dengan demikian dari target yang ditetapkan sebesar **14** Jumlah kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan pada lokus sesuai dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan, Dirjen PKP telah dapat memenuhi dengan membangun/ mengembangkan 30 kawasan sesuai dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan. Implementasi pembangunan kawaan perdesaan di 30 Kabupatendisajikan pada Tabel berikut.

## Tabel 3.8

### Implementasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017

| No | Provinsi / Kabupaten | Menu Kegiatan | Alokasi | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Aceh** | | | |
| 1 | Aceh Timur | PI PRUKADES | 260.000.000 | KPPN |
| | | Pembangunan Embung | 850.000.000 | |
| | | Bantuan Pabrik Es Mini | 1.180.000.000 | |
| **2** | **Sumatera Utara** | | | |
| 2 | Samosir | Jalan Kawasan Perdesaan | 968.000.000 | RIK ATR |
| | | Pengadaan Mesin Pengolah Pakan Ikan | 1.018.000.000 | |
| 3 | Toba Samosir | Jalan Kawasan Perdesaan | 955.000.000 | KPPN |
| | | Pembangunan Pariwisata Terpadu | 975.000.000 | |
| **3** | **Sumatera Barat** | | | |
| 4 | Pesisir Selatan | Jalan Kawasan Perdesaan | 923.000.000 | KPPN |
| | | Pembangunan Pariwisata Terpadu | 960.000.000 | |
| 5 | Tanah Datar | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 982.000.000 | RPKP |
| **4** | **Jambi** | | | |
| 6 | Merangin | Bantuan Mesin Pasca Panen Tanaman Kopi | 982.000.000 | RPKP |
| **5** | **Bengkulu** | | | |
| 7 | Bengkulu Utara | Jalan Kawasan Perdesaan | 954.000.000 | KPPN |
| **6** | **Lampung** | | | |
| 8 | Lampung Timur | PI PRUKADES | 260.000.000 | RPKP |
| | | Pasar Kawasan Perdesaan | 1.026.782.000 | |
| | | Jalan Kawasan Perdesaan | 875.000.000 | |
| | | Bantuan Pabrik Es Mini | 1.180.000.000 | |
| **7** | **Banten** | | | |
| 9 | Pandeglang | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 195.566.000 | KPPN |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | |
| | | Bantuan Usaha Kelompok Rumah Tangga Miskin | 350.000.000 | |
| | | Bantuan Keramba Jaring Apung | 964.172.000 | |
| | | Jukung Penyangkut Ikan Keramba | 185.828.000 | |
| 10 | Serang | Pembangunan Embung | 961.000.000 | RPKP |
| **8** | **Jawa Barat** | | | |
| 11 | Bandung Barat | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 212.000.000 | RPKP |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | |
| 12 | Cirebon | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 174.125.000 | RPKP |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | |
| 13 | Garut | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 274.601.000 | RPKP |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | |
| 14 | Indramayu | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 289.506.000 | RPKP |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | |
| 15 | Purwakarta | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 981.000.000 | RPKP |
| | | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 253.485.000 | |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | |
| 16 | Tasikmalaya | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 227.629.000 | RPKP |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | |
| 17 | Kuningan | Jalan Kawasan Perdesaan | 914.000.000 | RPKP |
| 18 | Bandung | Bantuan Mesin Pasca Panen Tanaman Kopi | 1.129.000.000 | RPKP |
| **9** | **Jawa Tengah** | | | |
| 19 | Pati | PI PRUKADES | 260.000.000 | RPKP |
| 20 | Klaten | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 231.720.000 | RPKP |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | RPKP |
| 21 | Temanggung | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 369.404.000 | RPKP |

| No | Provinsi / Kabupaten | Menu Kegiatan | Alokasi | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | RPKP |
| 22 | Blora | Pasar Kawasan Perdesaan | 962.557.000 | RIK ATR |
| | | Pembangunan Pariwisata Terpadu | 980.000.000 | |
| 23 | Pemalang | Bantuan Usaha Kelompok Rumah Tangga Miskin | 350.000.000 | RPKP |
| 24 | Wonogiri | Pembangunan Embung | 960.000.000 | RPKP |
| | | Home Industri Pakan Mini, Pengembangan Bio Gas dan Kotoran Ternak Menjadi Pupuk dan Biourine | 930.000.000 | |
| 25 | Karanganyar | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 981.000.000 | RPKP |
| **10** | **Jawa Timur** | | | |
| 26 | Ponorogo | PI PRUKADES | 260.000.000 | RPKP |
| | | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 982.000.000 | |
| 27 | Malang | PI PRUKADES | 260.000.000 | RPKP |
| | | Jalan Kawasan Perdesaan | 913.000.000 | |
| | | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 461.606.000 | |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | |
| | | Pembangunan Embung | 916.000.000 | |
| | | Pembangunan Pariwisata Terpadu | 1.010.000.000 | |
| 28 | Trenggalek | PI PRUKADES | 260.000.000 | RPKP |
| 29 | Banyuwangi | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 177.656.000 | KPPN |
| | | Bantuan Mesin Pasca Panen Tanaman Kopi | 982.000.000 | |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | |
| 30 | Gresik | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 297.110.000 | RPKP |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | |
| 31 | Jombang | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 206.857.000 | RPKP |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | |
| | | Jalan Kawasan Perdesaan | 1.170.000.000 | |
| 32 | Mojokerto | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 252.301.000 | RPKP |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | |
| 33 | Nganjuk | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 273.072.000 | RPKP |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | |
| 34 | Tuban | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 233.425.000 | RPKP |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | |
| 35 | Nganjuk | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 981.000.000 | RPKP |
| 36 | Bondowoso | Bantuan Mesin Pasca Panen Tanaman Kopi | 1.129.000.000 | RPKP |
| **11** | **DI Yogyakarta** | | | |
| 37 | Gunungkidul | Pembangunan Embung | 930.000.000 | RPKP |
| | | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 982.000.000 | |
| **12** | **Bali** | | | |
| 38 | Tabanan | Bantuan Usaha Kelompok Rumah Tangga Miskin | 350.000.000 | KPPN |
| **13** | **Kalimantan Selatan** | | | |
| 39 | Hulu Sungai Selatan | PI PRUKADES | 260.000.000 | KPPN |
| | | Sarana Prasarana Air Bersih | 700.000.000 | KPPN |
| | | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 982.000.000 | |
| **14** | **Kalimantan Barat** | | | |
| 40 | Kubu Raya | Jalan Kawasan Perdesaan | 881.000.000 | KPPN |
| | | Pembangunan Embung | 889.000.000 | |
| 41 | Sintang | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 982.000.000 | RPKP |
| **15** | **Kalimantan Utara** | | | |

| No | Provinsi / Kabupaten | Menu Kegiatan | Alokasi | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Nunukan | Pasar Kawasan Perdesaan | 983.419.000 | RPKP |
| | | Sarana Prasarana Air Bersih | 700.000.000 | |
| | | Bantuan Sarana dan Prasarana Peralatan Pasca Panen dan Pengolahan Kakao | 1.038.000.000 | |
| **16** | **Kalimantan Tengah** | | | |
| 43 | Kotawaringin Barat | Pengadaan Mesin Pengolah Pakan Ikan | 1.018.000.000 | KPPN |
| **17** | **Nusa Tenggara Barat** | | | |
| 44 | Sumbawa | PI PRUKADES | 260.000.000 | KPPN |
| | | Sarana Prasarana Air Bersih | 700.000.000 | |
| | | Home Industri Pakan Mini, Pengembangan Bio Gas dan Kotoran Ternak Menjadi Pupuk dan Biourine | 965.000.000 | |
| 45 | Lombok Tengah | PI PRUKADES | 260.000.000 | KPPN |
| 46 | Lombok Barat | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 323.226.000 | RPKP |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | |
| 47 | Lombok Timur | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 990.000.000 | KPPN |
| **18** | **Nusa Tenggara Timur** | | | |
| 48 | Ende | Jalan Kawasan Perdesaan | 960.000.000 | KPPN |
| 49 | Manggarai Barat | Sarana Prasarana Air Bersih | 648.000.000 | KPPN |
| 50 | Kupang | Pembangunan Embung | 895.000.000 | RPKP |
| 51 | Ngada | Bantuan Mesin Pasca Panen Tanaman Kopi | 982.000.000 | KPPN |
| **19** | **Gorontalo** | | | |
| 52 | Gorontalo Utara | Jalan Kawasan Perdesaan | 961.000.000 | KPPN |
| | | Pembangunan Embung | 914.000.000 | |
| | | Bantuan Pabrik Es Mini | 1.180.000.000 | |
| 53 | Pohuwato | Sarana Prasarana Air Bersih | 700.000.000 | RPKP |
| **20** | **Sulawesi Selatan** | | | |
| 54 | Sidenreng Rappang | Jalan Kawasan Perdesaan | 895.000.000 | KPPN |
| 55 | Tana Toraja | Jalan Kawasan Perdesaan | 1.833.000.000 | RPKP |
| | | Pembangunan Embung | 907.000.000 | |
| 56 | Bone | Pengadaan Mesin Pengolah Pakan Ikan | 1.070.000.000 | RPKP |
| 57 | Pinrang | Pengadaan Mesin Pengolah Pakan Ikan | 1.070.000.000 | KPPN |
| 58 | Bantaeng | Pembangunan Pariwisata Terpadu | 985.000.000 | |
| 59 | Barru | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 990.000.000 | KPPN |
| **21** | **Sulawesi Barat** | | | |
| 60 | Mamuju | Jalan Kawasan Perdesaan | 1.178.000.000 | KPPN |
| | | Pembangunan Embung | 916.000.000 | |
| 61 | Mamuju Tengah | Pembangunan Pariwisata Terpadu | 985.000.000 | KPPN |
| **22** | **Sulawesi Tengah** | | | |
| 62 | Sigi | PI PRUKADES | 260.000.000 | RPKP |
| | | Pembangunan Embung | 889.000.000 | |
| | | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 990.000.000 | |
| 63 | Buol | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 285.362.000 | KPPN |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | |
| | | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 990.000.000 | |
| 64 | Donggala | Bantuan Pabrik Es Mini | 1.180.000.000 | RPKP |
| 65 | Poso | Pembangunan Pariwisata Terpadu | 1.072.000.000 | KPPN |
| | | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 990.000.000 | |

| No | Provinsi / Kabupaten | Menu Kegiatan | Alokasi | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| **23** | **Sulawesi Tenggara** | | | |
| 66 | Konawe | Pembangunan Embung | 910.000.000 | RPKP |
| 67 | Konawe Selatan | Bantuan Keramba Jaring Apung | 1.122.000.000 | KPPN |
| **24** | **Maluku** | | | |
| 68 | Maluku Tengah | PI PRUKADES | 260.000.000 | KPPN |
| | | Jalan Kawasan Perdesaan | 862.000.000 | |
| | | Sarana Prasarana Air Bersih | 660.000.000 | |
| | | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 990.000.000 | |
| 69 | Seram Bagian Timur | Jalan Kawasan Perdesaan | 817.000.000 | KPPN |
| | | Pembangunan Embung | 941.000.000 | |
| 70 | Maluku Tenggara Barat | Sarana Prasarana Air Bersih | 1.000.000.000 | RPKP |
| **25** | **Maluku Utara** | | | |
| 71 | Halmahera Timur | PI PRUKADES | 260.000.000 | KPPN |
| | | Bantuan Pabrik Es Mini | 1.180.000.000 | |
| **26** | **Papua Barat** | | | |
| 72 | Raja Ampat | PI PRUKADES | 260.000.000 | KPPN |
| | | Pembangunan Pariwisata Terpadu | 1.460.000.000 | |
| 73 | Manokwari | Jalan Kawasan Perdesaan | 1.901.000.000 | KPPN |
| 74 | Sorong | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 990.000.000 | RPKP |
| **27** | **Papua** | | | |
| 75 | Merauke | Jalan Kawasan Perdesaan | 2.210.000.000 | KPPN |
| | | TOTAL | 94.342.409.000 | |

## C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Organisasi

Ketercapaian sasaran program Direktorat Jenderal Bina Konstruksi TA 2016 tentunya didukung oleh capaian output unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan tersebut dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

### 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Ketercapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dijabarkan melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2017 sebagai berikut:

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN** | | | |
| 1 | Peningkatan kinerja akuntabilitas | Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PKP berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) | 4 (Memuaskan) | 4 (Memuaskan) |
| | | Nilai SAKIP | 70 | 67 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| | | Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKP yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan | 100 (Persentase) | 100 (Persentase) |
| 2 | Peningkatan kompetensi ASN | Persentase ASN di lingkungan Ditjen PKP yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun | 9 (Persentase) | 16 (Persentase) |
| | | Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PKP | 88 | 93,5 |
| 3 | Peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran Ditjen PKP | Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKP | 82 | 76,31 |
| | | Persentase Kesesuaian sasaran RENJA yang diprogramkan dalam RKA Ditjen PKP | 91 (Persentase) | 91 (Persentase) |
| | | Rata-rata revisi DIPA di lingkungan Ditjen PKP | 3 (Kali) | 5 (Kali) |

Capaian indikator kinerja kegiatan Sekretariat Dirjen PKP merupakan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Dirjen PKP. Pada capaian Peningkatan kinerja akuntabilitas mempresentasikan dukungan seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Dirjen PKP. Adapun penjabaran dari seluruh capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

**a. Sasaran Kegiatan : Peningkatan Kinerja Akuntabilitas**

1) Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PKP berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Telah disusun Laporan Dokumen Pembinaan Akuntansi, Verifikasi dan Perbendaharaan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran, Pembinaan Akuntansi, Verifikasi dan Perbendaharaan yang ada di daerah.

a) Kegiatan Pendukung:

- Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Ditjen PKP
- Fasilitasi Pembinaan Akuntansi, Verifikasi dan Perbendaharaan
- Fasilitasi Penyusunan Laporan, Penatausahaan dan Pengelolaan BMN yang kegiatannya meliputi : 1) Koordinasi lingkup Ditjen PKP sebagai sarana perbaikan dalam upaya menjamin pencapaian sasaran data hasil pemantauan dan pengukuran; 2) Sosialisasi, pemantauan dan koordinasi terkait penatausahaan Barang Milik Negara (BMN); 3) Penyusunan dan pengelolaan laporan Barang Milik Negara tingkat UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan UAPPB Eselon 1 (Unit Akuntansi Pembantu

Pengguna Barang); 4) Penyusunan Laporan Persediaan Semester 1 dan 2 tingkat UAKPB; dan 5) Penataan dan pegelolaan (penghapusan, hibah, pinjam pakai).

b) Output:

Laporan Keuangan dan BMN Ditjen PKP sesuai komponen yang termuat dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari APIP.

c) Ketercapaian Indikator:

Penyajian Laporan Keuangan dan BMN yang sesuai SAP adalah laporan di bidang keuangan yang memuat:

- Neraca
- Laporan Operasional (LO)
- Laporan perubahan Ekuitas (LPE)
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA); serta
- Laporan di bidang BMN yang memuat: 1) Neraca; 2) Laporan Barang Intrakomtable; 3) Laporan Barang Ekstrakomtable; 4) Laporan Barang Intrakomtable dan Ekstrakomtable; 5) Laporan Barang Persediaan; 6) Laporan Kondisi Barang; 7) Laporan Penyusutan BMN; dan 8) Pelaksanaan Penatausahaan BMN.

Berdasarkan hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

- hasil penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKP yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan telah dilaksanakan, sehingga pencapaian dapat tercapai 100%.

2) Nilai SAKIP adalah Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi dapat disimpulkan bahwa hasil penilaian atas fakta objektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja telah sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada. Dari target yang pada tahun 2016, Capaian Kinerja atas indikator "Nilai hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal" memeiliki Target 65 dan Realisasi terhadap Target mencapai 67 sehingga persentase capaian adalah 100,3%.

1) Kegiatan Pendukung yang telah dilaksanakan:

- Fasilitasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Fasilitasi Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- Fasilitasi Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (Satuan Tugas SPIP)
- Fasilitasi Penyusunan Indikator dan Penetapan Kinerja

2) Output:
   Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Ditjen PKP dari APIP
3) Ketercapaian Indikator:
   SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.
   Kegiatan yang telah dilakukan untuk Ketercapaian Indikator anatara lain adalah:

- Telah menyusun Pedoman Penerapan SAKIP dengan terbitnya Permen Desa, PDT dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan SAKIP dengan melibatkan Kementerian PAN dan RB beserta masukan dari seluruh Unit Kerja.
- Mengembangkan dan mengimpelentasikan teknologi informasi dalam penerapan SAKIP dengan Membangun Pengkuran Kinerja dengan menggunakan teknologi informasi (E-SAKIP).
- Mereviu kembali IKU tingkat Kementerian dan UKE untuk memastikan bahwa IKU yang ditetapkan merupakan Core Bussines Kementerian dan UKE, kemudian menyelaraskan antara indikator kinerja UKE dengan IKU dan Renstra dan Perjanjian Kinerja dengan melibatkan Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB
- Telah Menyusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 yang berisikan mengenai pencapaian Sasaran Strategis kemudian sebagai bentuk perwujudan dalam transparansi publik, diunggah ke dalam website Kementerian.
- Menyelenggarakan Workshop Peningkatan pemahaman atas konsepsi "SAKIP" bagi aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

3) Persentase penyampaian laporan satuan kerja di lingkungan Ditjen PKP yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;

Definisi indikator kinerja ini adalah laporan wajib yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dengan jenis pelaporan sebagai berikut :

a) Laporan Pengendalian dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006.
b) Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249 Tahun 2011.
c) Laporan capaian atas sasaran strategis dan indikator kinerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Laporan Kinerja) pada tahun sebelumnya.

Penyampaian laporan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait.

Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kinerja untuk Penyampaian Laporan

| No. | Dokumen | Batas Waktu Penyampaian | Tanggal Penyampai-an | Keterangan | Capaian | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laporan Pengendalian dan Evaluasi atas pelaksanaan Renja K/L berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 | Minggu ke-2 setelah Triwulan berakhir. | Minggu ke-1 Triwulan I | Tepat Waktu | 100% | Portal : e-monev. bappenas.go.id |
| | | | Minggu ke-1 Triwulan II | Tepat Waktu | 100% | |
| | | | Minggu ke-1 Triwulan III | Tepat Waktu | 100% | |
| | | | Minggu ke-1 Triwulan IV | Tepat Waktu | 100% | |
| 2. | Laporan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 249 Tahun 2011 | Minggu ke-3 setelah Triwulan berakhir. | Minggu ke-2 Triwulan III (9 Oktober 2017) | Tepat Waktu | 100% | Aplikasi SMART (Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu)/ monev.anggaran.depkeu.go.id |
| | | | Minggu ke-3 Triwulan IV (20 Januari 2017) | Tepat Waktu | 100% | |
| 3. | Laporan capaian atas sasaran strategis dan indikator kinerja | 2 (Dua) Bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir | 28 Februari 2018 | Tepat Waktu | 100% | Surat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi |

| No. | Dokumen | Batas Waktu Penyampaian | Tanggal Penyampai-an | Keterangan | Capaian | Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | untuk Laporan Tingkat Kementerian. | | | | kepada 3 (Tiga) Menteri |

Dengan demikian, Capaian Kinerja atas indikator "Persentase Pelaporan Hasil Evaluasi yang disampaikan tepat waktu" dengan Target 100%, realisasi atas indikator dan target tersebut adalah 100%.

**b. Peningkatan Kompetensi SDM**

- Untuk mendukung tercapainya indikator Persentase ASN di lingkungan Ditjen PKP telah dilakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai yang dibutuhkan. Kegiatan tersebut antara lain:

  1) Fasilitasi Pengembangan SDM Aparatur

  2) Fasilitasi terkait Manajemen Kinerja Pegawai

- Ditinjau dari persentase ASN di lingkungan Ditjen PKP yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun 2017, pencapaiannnya telah memenuhi jumlah target tyang ditentukan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pertahun Jumlah ASN di Lingkungan Ditjen PKP yang mengikuti pengembangan kompetensi sebanyak 20 Orang dari Jumlah 122 ASN di lingkup Ditjen PKP, sehingga perhitungannya target dibagi yang mengikuti kompetensi sebanyak 20, sehingga pencapaian melebihi jumlah target yang ditentukan dengan nilai persentase 178%. Dalam menghitung persentase digunakan skala 1-100, sehingga nilai capaian sebesar 100%.

- Nilai rata-rata SKP ASN di lingkungan Ditjen PKP

  Perhitungan dilakukan dengan menggunakan formulasi perhitungan IKU dengan menggunakan nilai SKP Pegawai ASN pada Tahun 2017 dari hasil perhitungan IKU nilai SKP Pegawai ASN mendapatkan nilai persentase 106% dengan nilai rata –rata 93.5. dalam mendapatkan nilai rata-rata tersebut perhitungannya dengan cara mebandingkan nilai rata-rata kemudian dibagi nilai target pertahun. Dalam menghitung persentase digunakan skala 1-100, sehingga nilai capaian mendapatkan nilai sebesar 100%.

**c. Peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran**

Penilaian Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen PKP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L dari Kementerian

Keuangan RI Penilaian kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran menggunakan 5 (lima) indikator sebagai berikut:

1) Penyerapan anggaran;
2) Konsistensi atas rencana penarikan dana awal;
3) Konsistensi atas penarikan dana revisi;
4) Pencapaian keluaran; dan
5) Efisiensi

Berikut disampaikan tabel pencapaian kinerja yang tersaji sebagai berikut:

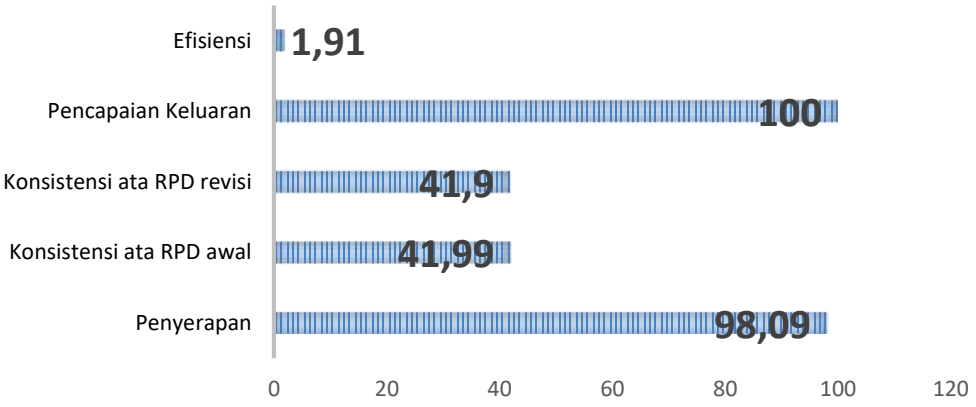


*Sumber: Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu (SMART).*

Dari hasil pencapaian kinerja Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu (SMART) yang dilakukan secara berkala Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan mendapatkan nilai 76.31 (Cukup). Pada prinsipnya pencapaian kinerja Aplikasi SMART pada Ditjen PKP sudah berjalan dengan baik. Namun hanya adanya tingkat deviasi dari rencana penarikan pada pagu awal dan realisasi setiap bulannya yang yang sangat berimplikasi terhadap capaian kinerja Ditjen PKP, sehingga hasil yang di dapat belum optimal.

## 2. Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Ketercapaian kinerja Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dijabarkan melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2017 sebagai berikut:

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| **II** | **DIREKTORAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN** | | | |
| 1 | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan | Jumlah dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan | 10 (Dokumen) | 12 (Dokumen) |
| | | Persentase dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang diimplementasikan | 100% (60 Dok) | 125% (75 Dok) |

a. Dokumen tersebut tercapai berdasar kepada laporan-laporan suboutput yang terdiri dari 12 kabupaten kota yang menjadi lokasi pendalaman kegiatan RPKP pada tahun 2017. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah sebagai berikut:

| Pusat Pertumbuhan | Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| 1) Peureulak | Aceh | 1) Aceh Timur |
| 2) Tapan | Sumatera Barat | 2) Pesisir Selatan (Sutera) |
| | | 3) Pesisir Selatan (Mandeh) |
| 3) Cibaliung | Banten | 4) Pandeglang |
| 4) Sambas | Kalimantan Barat | 5) Kayong Utara |
| 5) Sangata | Kalimantan Timur | 6) Kutai Timur |
| 6) Buol | Sulawesi Tengah | 7) Buol |
| 7) Mamuju | Sulawesi Barat | 8) Mamuju |
| 8) Raha | Sulawesi Tenggara | 9) Muna |
| 9) Manokwari | Papua Barat | 10) Manokwari |
| 10) Arso | Papua | 11) Jayapura |
| 11) Mesuji | Lampung | 12) Lampung Timur |

b. Sedangkan dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang diimplementasikan oleh Direktorat di lingkungan Dirjen PKP pada tahun 2017 berjumlah 75 kabupaten tersebar di 27 provinsi, dimana 30 diantaranya adalah lokasi KPPN, 42 kabupaten sudah memiliki RPKP dan 2 kabupaten merupakan lokasi kabupaten yang mendapat fasilitasi penyusunan Master Plan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Daftar kabupaten yang telah memiliki rencana aksi dan telah dilakukan fasilitasi oleh Dirjen PKP di sajikan dalam Daftar Lampiran 2.

Berdasarkan target dokumen rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang diimplementasikan sejumlah 60 dokumen, sedanhgkan pencapaian rencana aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun 2017 mencapai 75 dokumen, maka capaian kinerja mencapai 125%.

### 3. Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Ketercapaian kinerja Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan dijabarkan melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2017 sebagai berikut:

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| **III** | **DIREKTORAT PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN PERDESAAN** | | | |
| 1 | Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong Pusat pertumbuhan kawasan | Persentase kegiatan pengembangan ekonomi di kawasan perdesaan | 60 (Persentase) | 75 (Persentase) |

a. Target capaian kinerja kegiatan Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin Dalam Pengembangan Usaha sebanyak 3 Kecamatan, pada tahun 2017. Pembentukan dan pemberian bantuan stimulan BUMDES Bersama di Kawasan Perdesaan sebanyak 60 Lembaga Ekonomi. Pembangunan Pasar di Kawasan Perdesaan sebanyak 13 Unit dan Layanan dukungan tugas dan fungsi 12 bulan layanan.

b. Dalam pelaksanaannya, realisasi capaian kinerja kegiatan Pendampingan Kelompok Rumah Tangga Miskin Dalam Pengembangan Usaha sebanyak 3 Kecamatan mencapai 100% dengan jumlah 3 Kecamatan. Sedangkan Pembentukan dan pemberian bantuan stimulan BUMDES Bersama di Kawasan Perdesaan sebanyak 60 Lembaga Ekonomi mencapai 75% dari target 60 lembaga ekonomi yang tercapai adalah 45 lembaga ekonomi, yang terdiri dari kegiatan/program Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PI PRUKADES) di 15 Lokasi dan program Pengembangan Produk Unggulan Kawassan Perdesaan (PRUKADES) berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK) di 30 lokasi, hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran dengan mengefisiensi jumlah kabupaten penerima bantuan yang difokuskan pada lokasi prioritas. Dan Pembangunan Pasar di Kawasan Perdesaan sebanyak 13 Unit mencapai 100% dengan jumlah 13 unit pasar kawasan, serta Layanan dukungan tugas dan fungsi 12 bulan layanan mencapai 100% dengan jumlah 12 bulan layanan.

c. Dengan demikian capaian target Persentase kegiatan pengembangan ekonomi di kawasan perdesaan sebesar 75% telah tercapai.

## 4. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan

Ketercapaian kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan dijabarkan melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2017 sebagai berikut:

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| **IV** | **DIREKTORAT PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERDESAAN** | | | |
| 1 | Peningkatan prasarana dan sarana ekonomi dan pelayanan dasar di kawasan perdesaan | Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana ekonomi kawasan perdesaan | 65 (Persentase) | 122 (Persentase) |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar kawasan perdesaan | 65 (Persentase) | 100 (Persentase) |

a. Dalam rangka mencapai Peningkatan prasarana dan sarana ekonomi dan pelayanan dasar di kawasan perdesaan, Direktorat Pembangunan Sarana

Prasarana PKP telah melaksanakan kegiatan : pembangunan dan peningkatan jalan antar desa di 31 Kabupaten dengan panjang keseluruhan jalan yang terbangun sepanjang kurang lebih 45 km. Hal tersebut melebihi target yang ditetapkan diawal sebesar 37 km. Atau capaian lokasi mencapai 122%. Adapun realisasi anggaran pembangunan jalan antar desa sebesar Rp. 44,909,804,696 atau 99,81 %.

b. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar kawasan perdesaan telah dilaksanakan kegiatan:

1) Pembangunan Sarana & Prasana Air Bersih di Kawasan Perdesaan telah dilaksanakan di 11 kawasan pada 11 kabupaten, sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau 100%. Realisasi penggunaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 8,353,852,027 atau 99,98%

2) Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya untuk pertanian dilaksanakan sebanyak 22 unit di 22 kabupaten, yang mana targer pembangunan 22 unit tersebut dapat terbangun keseluruhan dengan realisasi penggunaan anggaran untuk kegiata ini sebesar Rp. 23,534,070,321 (99,98 %).

## 5. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

Ketercapaian kinerja Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan dijabarkan melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2017 sebagai berikut:

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| **V** | **DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM KAWASAN PERDESAAN** | | | |
| 1 | Terkembangkan dan termanfaat-kannya potensi sumber daya alam unggulan kawasan perdesaan dengan pendekatan berbasis lingkungan hidup berkelanjutan | Jumlah kawasan perdesaan yang potensi sumber daya alam unggulannya dikembangkan dan dimanfaatkan dengan pendekatan berbasis lingkungan hidup berkelanjutan | 10 (Kawasan) | 10 (Kawasan) |

Pada Tahun 2017, Kegiatan Pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan mentargetkan capaian kinerja kegiatan pada 10 kawasan. Dalam evaluasi pelaksanaannya, realisasi capaian kinerja kegiatan ini, Target capaian kinerja sasaran kegiatan adalah (100)% hal ini mencerminkan kinerja sangat baik. Capaian kinerjanya melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan perdesaan dengan pendekatan berkelanjutan (*sustainable*) antara lain: (*lampiran*)

1) Pembangunan/Pengembangan Potensi Pertanian dan Peternakan di Kawasan Perdesaan di 17 Provinsi, 30 Kabupaten, 34 Kecamatan, 35 Desa Titik Lokasi Kegiatan, 30 BUMDesa Bersama Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi berupa "Rice Milling", Seperangkat alat pengolah kakao, seperangkat mesin pembuat kopi, Pembangunan Pabrik dan Pengolah pakan ternak;

2) Pembangunan potensi perikanan di kawasan perdesaan 12 Provinsi, 15 Kabupaten, 15 Kecamatan, 15 Desa Titik Lokasi Kegiatan, 15 BUMDesa Bersama, Bantuan Pembangunan Keramba Jaring Apung dan Sarana Pendukung Keramba Jaring Apung, Seperangkat alat pengolah pakan ikan, Pembangunan gedung dan Mesin Pembuat Es mini;

3) Pembangunan/Pengembangan potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan di 9 Provinsi, 12 Kabupaten, 14 Kecamatan, 15 Desa Titik Lokasi Kegiatan, 12 BUMDesa Bersama, pengadaan barang sarana pendukung pariwisata berupa Dermaga apung, speed boat, banana boat, donut boat, band wagon, Pembangunan/pengadaan konstruksi berupa, gazebo, homestay, MCK, Restoran.

## 6. Direktorat Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas

Ketercapaian kinerja Direktorat Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas dijabarkan melalui capaian Perjanjian Kinerja TA 2017 sebagai berikut:

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Utama | Target | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| **VI** | **DIREKTORAT KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS** | | | |
| 1 | Pengembangan kawasan perdesaan melalui peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas | Jumlah Kawasan Perdesaan yang melakukan Kerjasama dan kemitraan | 20 (Kawasan) | 21 (Kawasan) |
| | | Jumlah kawasan perdesaan yang mendapatkan pendampingan | 60 (Kawasan) | 60 (Kawasan) |

- Target yang ditetapkan pada indikator kinerja pertama ini sebanyak 20 (duapuluh) dokumen dan dapat dicapai, bahkan menghasilkan 21 (duapuluhsatu) dokumen kesepakatan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pembangunan kawasan perdesaan. Dengan demikian, maka realisasi capaiannya kinerja pada indikator kinerja pertama adalah 105 %.

Dari 21 (duapuluhsatu) dokumen kesepakatan kerjasama dan kemitraan tersebut dapat dijelaskan bahwa para pihak yang telah melakukan kesepakatan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan usaha dan produksi di kawasan perdesaan. Hasil kesepakatan kerjasama dan kemitraan ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) terdapat 21 (duapuluhsatu) dokumen yang terdiri dari; 4 (empat) dokumen surat kesepakatan/perjanjian kerjasama, 3 (tiga) dokumen perjanjian kerjasama, 10 (sepuluh) dokumen nota kesepahaman/kesepakatan, dan 4 (empat) dokumen kesepakatan bersama
2) melibatkan 1 (satu) Lembaga Pendidikan Menengah Kejuruan, 6 (enam) BUMN termasuk 2 (dua) Bank Negara, 4 (empat) perusahaan swasta, 7 (tujuh) pemerintah daerah, dan 7 (tujuh) Bumdesa Bersama;
3) berada di 11 kabupaten;
4) mencakup 9 jenis bidang usaha; dan
5) 4 (empat) rencana pendirian PT. Mitra Bumdes Kabupaten. Data dan informasi terkait kesepakatan kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud diatas dapat dilihat pada lampiran.

- Indikator kinerja kedua ini dilaksanakan oleh Subdit Pendampingan Manajemen dan Teknis melalui komponen kegiatan fasilitasi pendampingan manajemen dan teknis pembangunan kawasan perdesaan di 64 kabupaten yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

  Realisasi capaian target kinerja untuk indikator kinerja kedua ini tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 64 kabupaten yang difasilitasi pendampingan pembangunan kawasan perdesaan, dengan demikian maka persentase realisasi capaian target kinerjanya sebesar 100%.

  Pada komponen ini terdapat aktivitas sebagai tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan yakni penyusunan regulasi setingkat Menteri terkait dengan penataan kelembagaan pengelolaan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPd dengan target keluaran yang diharapkan adalah dokumen regulasi berupa Peraturan Menteri Desa, PDTT serta pedoman tentang hal tersebut. Sampai dengan dibuatnya laporan kinerja ini, telah tersedia draft final regulasi setingkat Peraturan Menteri Desa, PDTT tentang penataan kelembagaan pengelolaan dana bergulir masyarakat eks PNPM-MPd dan panduan pelaksanaannya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Menteri tersebut. Dengan demikian maka target yang diharapkan dari tugas tambahan ini dapat dicapai, dengan persentase realisasi capaian target kinerja sebesar 100 %.

## D. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA dari Kementerian Keuangan dengan Nomor: SP DIPA-067.04.1.350453/2017, alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaaan Tahun 2017 sebesar Rp **321.540.655.000,-** (***tiga ratus dua puluh satu miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah***).

Selanjutnya dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017, Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 pada 22 Juni 2017, yang meliputi perjalanan dinas dan paket meeting, honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan non operasional lainnya. Dari total penghematan Rp 16 Triliun, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi ikut terkena penghematan sebesar Rp 268,600 miliar.

Direktorat Jenderal PKP mengalami penghematan anggaran sebesar Rp 30 miliar berdasarkan Surat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor : S.689/M-PDT/08/2017 tentang Pemotongan Belanja Barang APBN-P Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun 2017 pada tanggal 4 Agustus 2017, sehingga alokasi anggaran APBN-P 2017 menurun sebesar 9,33% menjadi **Rp.291.540.655.000,-** (***Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah***)

Realisasi anggaran sampai akhir tahun adalah sebesar **Rp. 286.421.656.614,-** atau sebesar **98,24%** yang merupakan capaian tertinggi Eselon I di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Capaian Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Program Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.10**
**Capaian Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Program**
**Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017**

| No | Sasaran Program | Anggaran (Rp. Juta) | Realisasi (Rp. Juta) | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (termasuk pada wilayah Tertinggal, Terdepan/ Terluar dan Wilayah Timur) | 291.540,66 | 286.421,66 | 98,24% |

Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya terjadi sedikit penurunan sebesar 0,65%, namun masih lebih baik dibanding 2 tahun sebelumnya. Realisasi anggaran sejak tahun 2015-2017 disajikan pada Grafik berikut.

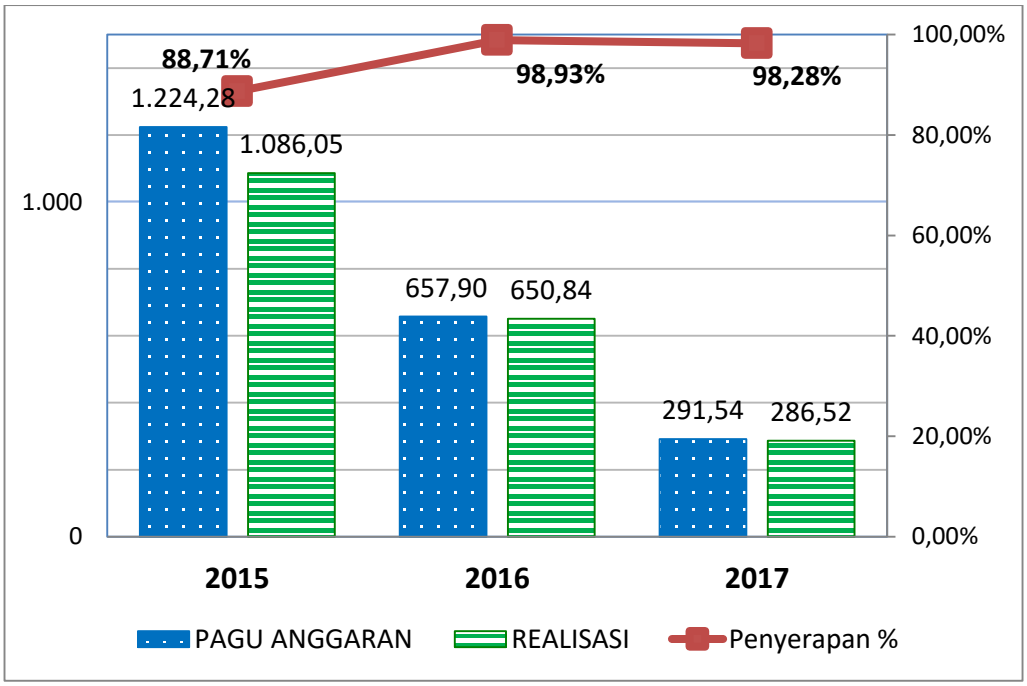


Sedangkan capaian Realisasi Anggaran berdasarkan masing-masing Unit Kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017 disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.11**
**Capaian Realisasi Anggaran Berdasarkan Unit Kerja Direktorat**
**Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017**

| Kode | Unit Kerja / Direktorat | Pagu (Rp juta) | Realisasi | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah (Rp juta) | % |
| 5487 | Sekretariat Ditjen | 50.565,36 | 47.532,54 | 94,00% |
| 5488 | Dit. Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan | 13.098,00 | 12.656,67 | 96,63% |
| 5489 | Dit. Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan | 50.428,68 | 50.406,10 | 99,96% |
| 5490 | Dit. Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan | 78.558,24 | 78.078,38 | 99,39% |
| 5491 | Dit. Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan | 74.018,25 | 73.139,50 | 98,81% |
| 5492 | Dit. Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas | 24.872,13 | 24.704,47 | 99,33% |
| **067.04.07** | **Program PKP** | **291.540,66** | **286.517,66** | **98,28%** |

## E. ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

### 1. Faktor Pendukung

1) Proses penelahaan anggaran bisa dapat dilakukan dengan cukup cepat;
2) Kerja sama dan kerja keras personil Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana PKP meskipun dengan jumlah terbatas;
3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara efektif sehingga proses pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

### 2. Tindaklanjut

Guna meningkatkan upaya pembangunan kawasan perdesaan dan mengatasi berbagai permasalahan pada Tahun 2017 Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Tahun 2018 akan melakukan kebijakan sebagai berikut :

1) Mempercepat proses penelaahan anggaran pada awal tahun ;
2) Meningkatkan kerja sama dan kerja keras personil Ditjen PKP;

3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara efektif sehingga proses pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan;

4) Perlu upaya-upaya strategis dan inovatif agar kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif, serta komitmen yang kuat dari segenap jajaran di lingkungan Ditjen PKP.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran didasarkan pada aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi (*compliance*) dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban pada tahun 2017. Pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan diarahkan pada 1 (satu) sasaran program dan 1 (satu ) indikator kinerja utama. Hasil capaian kinerja utama yang ditetapkan, telah dapat memenuhi target, bahkan melebihi dari rencana yang telah ditetapkan. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 14 kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan pada lokus sesuai dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan, Ditjen PKP telah dapat mengimplementasikan kegiatan di 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan, atau sebesar 214% dengan kategori capaian "Sangat Baik".

Sedangkan capaian realisasi penyerapan anggaran Dirjen PKP Tahun 2017 adalah sebesar **Rp.286.421.656.614,-.** Apabila realisasi penyerapan dibandingkan dengan Pagu sebesar **Rp.291.540.655.000,-** maka prosentase capaian penyerapan adalah sebesar **98,24%.** Capaian ini merupakan realisasi penyerapan paling tinggi di lingkungan Ditjen Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Sedangkan jika realisasi penyerapan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 98,93%, maka realiasi penyerapan anggaran sedikit menurun sebesar 9,33%.

Dengan terlaksananya kegiatan dan pencapaian target, baik Capaian Kinerja maupun Realisasi Anggaran, diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan instrospeksi terhadap kinerja pada tahun-tahun berikutnya agar pencapaian kinerja dapat lebih optimal dan pencapaian target Tahun 2017 dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

## B. Saran

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan vaiabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya. Variabel penyerapan anggaran hanya merupakan salah satu dari ukuran kinerja pelaksanaan anggaran. Variabel lain yang tidak kalah penting antara lain adalah: Revisi DIPA, Pengelolaan UP, Pengembalian/ Kesalahan SPM, Penyelesaian Tagihan, Data Kontrak dll.

Sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang, maka perlu dipersiapkan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan realisasi untuk tahun anggaran 2018 maka perlu adanya pemantapan pelaksanaan dengan fokus percepatan penyerapan anggaran, melakukan penyelesaian tahap lelang program/kegiatan pada awal tahun;
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka percepatan penerbitan DIPA Revisi;
3. Dibutuhkan segera Regulasi dari Pemerintah Pusat yang lebih terfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam ini perlu ditetapkan Lokasi Penerima Manfaat disesuaikan dengan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perdesaan dimana dokumen dimaksud menjadi koridor dan target yang menjadi acuan pelaksanaan kinerja pada masing-masing Direktorat;
4. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten serta komitmen yang kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Ditjen PKP mulai dari Eselon I - IV, Staf sampai tenaga pendukung serta pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan.;
5. Mendorong penguatan kelembagaan masyarakat untuk peningkatan keterjangkauan pelayanan pemanfaatan Sumberdaya Alam Kawasan Perdesaan berbasis masyarakat.
6. Melakukan pemantauan secara rutin setiap proses pelaksanaan pelelangan/pengadaan barang/jasa sehingga dapat diketahui secara dini berbagai hambatan yang terjadi.
7. Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini terhadap perubahan lingkungan strategis sehingga dapat memberikan kontribusi dan peran positif bagi

peningkatan kinerja dan mampu segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan di lingkup Ditjen PKP;

8. Mensinergikan pengelolaaan potensi kawasan perdesaan dengan melibatkan Pemerintah, Swasta, BUMN, dan masyarakat (CSR) untuk pelaksanaan kerjasama dan pengembangan kapasitas di kawasan perdesaan secara partisipatif.

*****

# LAMPIRAN

**Lampiran. 1 Perjanjian Kinerja Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017**

**PERJANJIAN KINERJA**
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**
**TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Erani Yustika
Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Eko Putro Sandjojo
Jabatan : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2017

**Pihak Kedua,**

**Eko Putro Sandjojo**

**Pihak Pertama,**

**Ahmad Erani Yustika**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja Utama | Target |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (termasuk pada wilayah Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur) | Jumlah kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan pada lokus sesuai dokumen rencana aksi pembangunan kawasan perdesaan | 14 (Kawasan) |

**Program**
1 Pembangunan Kawasan Perdesan

**Anggaran**
Rp. 291.540.655.000
(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Jakarta, September 2017

**Pihak Kedua,**

**Eko Putro Sandjojo**

**Pihak Pertama,**

**Ahmad Erani Yustika**

**Lampiran. 2 Implementasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2017**

| No | Provinsi / Kabupaten | Menu Kegiatan | Alokasi Anggaran | Volume | | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aceh Timur | PI PRUKADES | 260.000.000 | 1 | Paket | Idi Rayeuk |
| | | Pembangunan Embung | 850.000.000 | 1 | Paket | Idi Rayeuk |
| | | Bantuan Pabrik Es Mini | 1.180.000.000 | 1 | Unit | Idi Rayeuk |
| 2. | Toba Samosir | Jalan Kawasan Perdesaan | 955.000.000 | 1 | Paket | Balige |
| | | Pembangunan Pariwisata Terpadu | 975.000.000 | 1 | Paket | Balige |
| 3. | Pesisir Selatan | Jalan Kawasan Perdesaan | 923.000.000 | 1 | Paket | Sutera |
| | | Pembangunan Pariwisata Terpadu | 960.000.000 | 1 | Paket | Mandeh |
| 4. | Bengkulu Utara | Jalan Kawasan Perdesaan | 954.000.000 | 1 | Paket | Pinang Raya |
| 5. | Pandeglang | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 195.566.000 | 1 | Paket | Cimanggu |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | 1 | Paket | Cimanggu |
| | | Bantuan Usaha Kelompok Rumah Tangga Miskin | 350.000.000 | 1 | Paket | Cikeusik |
| | | Bantuan Keramba Jaring Apung | 964.172.000 | 1 | Paket | Cikeusik |
| | | Jukung Penyangkut Ikan Keramba | 185.828.000 | 1 | Paket | Cikeusik |
| 6. | Banyuwangi | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 177.656.000 | 1 | Paket | Genteng |
| | | Bantuan Mesin Pasca Panen Tanaman Kopi | 982.000.000 | 1 | Paket | Genteng |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | 1 | Paket | Genteng |
| 7. | Tabanan | Bantuan Usaha Kelompok Rumah Tangga Miskin | 350.000.000 | 1 | Paket | Pupuan |
| 8. | Kotawaringin Barat | Pengadaan Mesin Pengolah Pakan Ikan | 1.018.000.000 | 1 | Paket | Kumai |
| 9. | Hulu Sungai Selatan | PI PRUKADES | 260.000.000 | 1 | Paket | Simpur |
| 10. | Kubu Raya | Jalan Kawasan Perdesaan | 881.000.000 | 1 | Paket | Kuala Mandor B |
| | | Pembangunan Embung | 889.000.000 | 1 | Paket | Kuala Mandor B |
| 11. | Sumbawa | PI PRUKADES | 260.000.000 | 1 | Paket | Utan |
| | | Sarana Prasarana Air Bersih | 700.000.000 | 1 | Paket | Utan |

| No | Provinsi / Kabupaten | Menu Kegiatan | Alokasi Anggaran | Volume | | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Home Industri Pakan Mini, Pengembangan Bio Gas dan Kotoran Ternak Menjadi Pupuk dan Biourine | 965.000.000 | 1 | Paket | Utan |
| 12. | Lombok Tengah | PI PRUKADES | 260.000.000 | 1 | Paket | Kopang |
| 13. | Lombok Timur | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 990.000.000 | 1 | Paket | Keruak |
| 14. | Ende | Jalan Kawasan Perdesaan | 960.000.000 | 1 | Paket | Ende Utara |
| 15. | Manggarai Barat | Sarana Prasarana Air Bersih | 648.000.000 | 1 | Paket | Komodo |
| 16. | Ngada | Bantuan Mesin Pasca Panen Tanaman Kopi | 982.000.000 | 1 | Paket | Golewa |
| 17. | Gorontalo Utara | Jalan Kawasan Perdesaan | 961.000.000 | 1 | Paket | Ponelo Kepulauan |
| | | Pembangunan Embung | 914.000.000 | 1 | Paket | Tolinggula |
| | | Bantuan Pabrik Es Mini | 1.180.000.000 | 1 | Unit | Tolinggula |
| 18. | Sidenreng Rappang | Jalan Kawasan Perdesaan | 895.000.000 | 1 | Paket | Pitu Riase |
| 19. | Pinrang | Pengadaan Mesin Pengolah Pakan Ikan | 1.070.000.000 | 1 | Paket | Suppa |
| 20. | Mamuju | Jalan Kawasan Perdesaan | 1.178.000.000 | 1 | Paket | Kalumpang |
| | | Pembangunan Embung | 916.000.000 | 1 | Paket | Kalumpang |
| 21. | Mamuju Tengah | Pembangunan Pariwisata Terpadu | 985.000.000 | 1 | Paket | Karossa |
| 22. | Buol | Bantuan Sarana dan Prasarana UBK | 285.362.000 | 1 | Paket | Bukal |
| | | Bantuan Modal UBK | 75.000.000 | 1 | Paket | Bukal |
| | | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 990.000.000 | 1 | Paket | Bukal |
| 23. | Poso | Pembangunan Pariwisata Terpadu | 1.072.000.000 | 1 | Paket | Pamona Puselemba |
| | | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 990.000.000 | 1 | Paket | Pamona Puselemba |
| 24. | Konawe Selatan | Bantuan Keramba Jaring Apung | 1.122.000.000 | 1 | Paket | Uepai |
| 25. | Maluku Tengah | PI PRUKADES | 260.000.000 | 1 | Paket | Seram Utara Timur Kobi |
| | | Jalan Kawasan Perdesaan | 862.000.000 | 1 | Paket | Leihitu Barat |
| | | Sarana Prasarana Air Bersih | 660.000.000 | 1 | Paket | Seram Utara Timur Kobi |
| | | Bantuan Mesin pengolahan pasca panen padi | 990.000.000 | 1 | Paket | Seram Utara Timur Kobi |
| 26. | Seram Bagian Timur | Jalan Kawasan Perdesaan | 817.000.000 | 1 | Paket | Siwalalat |

| No | Provinsi / Kabupaten | Menu Kegiatan | Alokasi Anggaran | Volume | | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pembangunan Embung | 941.000.000 | 1 | Paket | Bula Barat |
| 27. | Halmahera Timur | PI PRUKADES | 260.000.000 | 1 | Paket | Maba Tengah |
| | | Bantuan Pabrik Es Mini | 1.180.000.000 | 1 | Unit | Maba Tengah |
| 28. | Raja Ampat | PI PRUKADES | 260.000.000 | 1 | Paket | Waigeo Selatan |
| | | Pembangunan Pariwisata Terpadu | 1.460.000.000 | 1 | Paket | Waigeo Selatan |
| 29. | Manokwari | Jalan Kawasan Perdesaan | 1.901.000.000 | 1 | Paket | Sidey |
| 30. | Merauke | Jalan Kawasan Perdesaan | 2.210.000.000 | 1 | Paket | Jagebob |

**Lampiran 3. Fasilitasi Rencana Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahun 2017**

| KABUPATEN/ PROVINSI/ KPPN/ WILAYAH | | NAMA KAWASAN | | POTENSI | KECAMATAN | DESA | | SK KAWASAN | SK TKPKP | PERBUP RPKP | BUMDES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh KPPN Peureulak Wilayah I (Sumatera) | 1 | Kawasan Perdesaan Minapolitan Idi Rayeuk | Perikanan Tangkap (Ikan Tongkol) dan<br><br>Perikanan Budidaya (Bandeng) | Idi Rayeuk | 1 | Dama Pulo | KEPBUP.ACEH TIMUR NOMOR: 050/804/2016 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN ACEH TIMUR | KEPBUP.ACEH TIMUR NOMOR: 050/805/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TKPKP KABUPATEN ACEH TIMUR | PERBUP. ACEH TIMUR NOMOR 119 TAHUN 2017 TENTANG RPKP KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 - 2020 | Minapolitan Jaya |
| | | | | | | 2 | Kuta Lawah | | | | |
| | | | | | | 3 | Seuneubok Tutong | | | | |
| | | | | | | 4 | Alue Dua Muka O | | | | |
| | | | | | | 5 | Alue Dua Muka S | | | | |
| | | | | | | 6 | Tanjong Kapai | | | | |
| | | | | | | 7 | Seuneubok Rambong | | | | |
| | | | | | | 8 | Ulee Blang | | | | |
| | | | | | | 9 | Kuala Peudawa Puntong | | | | |
| | | | | | | 10 | Teupin Batee | | | | |
| | | | | | | 11 | Seuneubok Teungoh | | | | |
| | | | | | | 12 | Gampong Baro | | | | |
| | | | | | | 13 | Keutapang Mameh | | | | |
| | | | | | | 14 | Blang Geulumpang | | | | |
| | | | | | | 15 | Gampong Jawa | | | | |
| | | | | | Darul Aman | 16 | Meunasah Blang | | | | |
| | | | | | | 17 | Seuneubok Aceh | | | | |
| | | | | | | 18 | Bagok Panah Sa | | | | |
| | | | | | | 19 | Teupin Drum | | | | |
| | | | | | | 20 | Matang Pineung | | | | |

| KABUPATEN/ PROVINSI/ KPPN/ WILAYAH | | NAMA KAWASAN | | POTENSI | KECAMATAN | DESA | | SK KAWASAN | SK TKPKP | PERBUP RPKP | BUMDES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 21 | Kuala Idi Cut | | | | |
| | | | | | | 22 | Seuneubok Baroh | | | | |
| | | | | | | 23 | Keude | | | | |
| | | | | | | 24 | Baro | | | | |
| | | | | | | 25 | Beunot | | | | |
| | | | | | Idi Timur | 26 | Matang Rayeuk PP | | | | |
| | | | | | | 27 | Matang Rayeuk SMK | | | | |
| | | | | | | 28 | Matang Beungong | | | | |
| | | | | | Peudawa | 29 | Keude | | | | |
| | | | | | | 30 | Matang Rayeuk | | | | |
| | | | | | | 31 | Alue Ie Itam | | | | |
| | | | | | | 32 | Kuala | | | | |
| | | | | | | 33 | Paya Dua | | | | |
| | | | | | Peureulak Barat | 34 | Alue Bu Jalan Baroh | | | | |
| | | | | | | 35 | Alue Bu Jalan | | | | |
| | | | | | | 36 | Alue Bu Tuha | | | | |
| | | | | | | 37 | Paya Gajah | | | | |
| | | | | | Peureulak | 38 | Bale Buya | | | | |
| | | | | | | 39 | Seuneubok Peusangan | | | | |
| | | | | | | 40 | Seuneubok Aceh | | | | |
| | | | | | | 41 | Kuala Leunge | | | | |
| | | | | | | 42 | Alue Nibong | | | | |
| | | | | | | 43 | Bangka Rimueng | | | | |
| | | | | | | 44 | Cot Muda Itam | | | | |
| | | | | | | 45 | Pasir Putih | | | | |
| | | | | | | 46 | Beusa Mearanoe | | | | |
| | | | | | | 47 | Keuala Bugak | | | | |
| | | | | | | 48 | Dama Tutong | | | | |
| | | | | | | 49 | Seuneubok Pidie | | | | |
| | | | | | | 50 | Cot Keh | | | | |
| | | | | | | 51 | Paya Lipah | | | | |
| | | | | | | 52 | Matang Gleum | | | | |
| | | | | | | 53 | Seumatang Muda Itam | | | | |
| 2 | Kabupaten Pesisir Selatan | 2 | Kawasan Perdesaan Budidaya Sapi | Sapi | Sutera | 1 | Taratak | KEPBUP.PESISIR SELATAN NOMOR: | KEP BUP. PESISIR SELATAN NOMOR: | PERBUP PESISIR SELATAN NOMOR 48 TAHUN 2017 | Budidaya Sapi |
| | | | | | | 2 | Surantih | | | | |
| | | | | | | 3 | Amping Parak | | | | |

| KABUPATEN/ PROVINSI/ KPPN/ WILAYAH | | NAMA KAWASAN | | POTENSI | KECAMATAN | DESA | SK KAWASAN | SK TKPKP | PERBUP RPKP | BUMDES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Provinsi Sumatera Barat KPPN Tapan Wilayah I (Sumatera) | | | | | 4 Amping Parak Timur<br>5 Koto Taratak<br>6 Lansano Taratak<br>7 Aur Duri Surantih<br>8 Rawang Gunung Malelo Surantih<br>9 Koto Nan Tigo Selatan Surantih<br>10 Koto Nan Tigo Utara Surantih<br>11 Ganting Mudiak Selatan Surantih<br>12 Ganting Mudiak Utara Surantih | 050/492/KPTS/BPT-PS/2016 | 050/189/KPTS/BPTPS/2016 DAN<br><br>SK BUP. NOMOR 410/461/KPST/BPT-PS/2017(SK TKPKP KAWASAN)<br><br>KEPBUP. PESISIR SELATAN NOMOR: 050/189/KPTS/BPT-PS/2017 (SK TKPKP KABUPATEN) | | |
| 3 | Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat KPPN Tapan Wilayah I (Sumatera) | 3 | Kawasan Perdesaan Berbasis Industri Pariwisata | Wisata | Koto XI Tarusan | 1 Sungai Pinang<br>2 Sungai Nyalo Mudik Air<br>3 Mandeh<br>4 Carocok Anau Ampang Pulai<br>5 Pulau Karam Ampang Pulai<br>6 Jinang Kampung Pansurn Ampang Pulai<br>7 Nagari Ampang Pulai<br>8 Setara Nanggalo<br>9 Nanggalo<br>10 Kapuh<br>11 Kapuh Utara<br>12 Batu Hampar<br>13 Duku<br>14 Barung-Barung Belantai<br>15 Siguntur<br>16 Taratak Sungai Lundang<br>17 Barung-Barung Belantai Selatan<br>18 Hampar Selatan | KEPBUP.PESISIR SELATAN NOMOR: 050/402/KPTS/BPT-PS/2017 | KEPBUP. PESISIR SELATAN NOMOR: 410/462/KPTS/BPT-PS/2017 (SK TKPKP KAWASAN)<br><br>KEPBUP. PESISIR SELATAN NOMOR: 050/189/KPTS/BPT-PS/2017 (SK TKPKP KABUPATEN) | PERBUP PESISIR SELATAN NOMOR 46 TAHUN 2017 | Kawasan Perdesaan Pariwisata |

| KABUPATEN/ PROVINSI/ KPPN/ WILAYAH | | NAMA KAWASAN | | POTENSI | KECAMATAN | DESA | | SK KAWASAN | SK TKPKP | PERBUP RPKP | BUMDES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 19 | Duku Utara | | | | |
| | | | | | | 20 | Barung-Barung Belantai Timur | | | | |
| | | | | | | 21 | Siguntur Tua | | | | |
| | | | | | | 22 | Kampung Baru Korong Nan Ampek | | | | |
| | | | | | | 23 | Barung-Barung Belantai Tengah | | | | |
| 4 | Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung KPPN Tapan Wilayah I (Sumatera) | 4 | Kawasan Perdesaan Agropolitan-Minapolitan Sukakarya | Perikanan (Udang, Bandeng, Patin, Bawal, Tenggiri)<br><br>Pertanian Tanaman Pangan (Padi) | Labuhan Maringgai | 1 | Karya Tani | PER.BUP NOMOR B.526/10-SK/2017 | | | Agrominapolitan Sukakarya |
| | | | | | | 2 | Karya Makmur | | | | |
| | | | | | | 3 | Bandar Negeri | | | | |
| | | | | | | 4 | Muara Gading Mas | | | | |
| | | | | | | 5 | Maringgai | | | | |
| | | | | | | 6 | Labuhan Maringgai | | | | |
| | | | | | | 7 | Sriminosari | | | | |
| | | | | | | 8 | Srigading | | | | |
| | | | | | | 9 | Margasari | | | | |
| | | | | | | 10 | Karanganyar | | | | |
| | | | | | | 11 | Sukorahayu | | | | |
| | | | | | Pasir Sakti | 1 | Mekar Sari | | | | |
| | | | | | | 2 | Pasir Sakti | | | | |
| | | | | | | 3 | Mulyo Sari | | | | |
| | | | | | | 4 | Purworejo | | | | |
| | | | | | | 5 | Rejomulyo | | | | |
| | | | | | | 6 | Kedungringin | | | | |
| | | | | | | 7 | Labuhan Ratu | | | | |
| | | | | | | 8 | Sumur Kucing | | | | |
| 5 | Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten KPPN Cibaliung Wilayah II (Jawa Bali) | 5 | Kawasan Perdesaan Mina-Agro Wisata Karakatau | Melinjo, Perikanan dan wisata | Labuan | 1 | Labuan | SK BUPATI NO. 147/KEP.419-HUK/2016 | SK TKPKP KAB. NOMOR : 147/KEP.420-HUK/2016 | | Mas Karakatau |
| | | | | | | 2 | Banyubiru | | | | |
| | | | | | | 3 | Caringin | | | | |
| | | | | | | 4 | Teluk | | | | |
| | | | | | Jiput | 5 | Jiput | | | | |
| | | | | | | 6 | Sukacai | | | | |
| | | | | | | 7 | Tenjolahang | | | | |
| | | | | | | 8 | Banyuresmi | | | | |
| 6 | Kab. Kutai Timur | 6 | | Beras Organik | Sangatta Selatan | 1 | Sangatta Selatan | | | | |

| KABUPATEN/ PROVINSI/ KPPN/ WILAYAH | | NAMA KAWASAN | | POTENSI | KECAMATAN | DESA | | SK KAWASAN | SK TKPKP | PERBUP RPKP | BUMDES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prov. Kaltim KPPN Sangatta Wilayah III (Kalimantan) | | Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK Kutai Timur | | | 2 | Sangkima | | KEP.BUP NOMOR 050/K.330/2016 | PER.BUP NOMOR 5 TAHUN 2016 | Ekowisata terpadu TNK-Kutai Timur |
| | | | | | | 3 | Teluk Sangkima | | | | |
| | | | | | Teluk Pandan | 4 | Kandolo | | | | |
| | | | | | | 5 | Teluk Pandan | | | | |
| 7 | Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Timur KPPN Sambas Wilayah III (Kalimantan) | 7 | Kawasan Agribisnis Kayong Lestari | Padi | Simpang Hilir | 1 | Padu Banjar | KEP BUP. NOMOR 795/BAPPEDA-SET/X/2017 | KEPBUP. NOMOR 784/BAPPEDA-A/X/2016 | PERBUP NOMOR 73 TAHUN 2017 | Agribisnis Kayong Lestari |
| | | | | | | 2 | Pemangkat | | | | |
| | | | | | | 3 | Nipah Kuning | | | | |
| | | | | | | 4 | Teluk Melano | | | | |
| | | | | | | 5 | Medan Jaya | | | | |
| | | | | | | 6 | Sungai Mata-Mata | | | | |
| | | | | | | 7 | Batu Barat | | | | |
| | | | | | | 8 | Matan Jaya | | | | |
| | | | | | | 9 | Lubuk Batu | | | | |
| | | | | | Teluk Batang | 10 | Sungai Paduan | | | | |
| | | | | | | 11 | Alur Bandung | | | | |
| | | | | | | 12 | Banyu Abang | | | | |
| | | | | | | 13 | Mas Bangun | | | | |
| | | | | | | 14 | Teluk Batang | | | | |
| | | | | | | 15 | Teluk Batang Selatan | | | | |
| | | | | | | 16 | Teluk Batang Utara | | | | |
| 8 | Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah KPPN Buol Wilayah IV (Sulawesi) | 8 | Kawasan Perdesaan Agropolitan Lipunoto | Padi dan jagung | Tiloan | 1 | Kokobuka | KEPBUP NOMOR: 188.04/240.38/BAPPEDA.PM/2016 | KEP.BUP NOMOR : 188.04/241.38/BAPPEDA-PM/2016 | PERBUP NOMOR 45 TAHUN 2017 | Agropolitan Lipunoto |
| | | | | | | 2 | Panilan Jaya | | | | |
| | | | | | | 3 | Lomuli | | | | |
| | | | | | | 4 | Balau | | | | |
| | | | | | | 5 | Maniala | | | | |
| | | | | | | 6 | Boilan | | | | |
| | | | | | | 7 | Air Terang | | | | |
| | | | | | | 8 | Monggonit | | | | |
| 9 | Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat KPPN Mamuju Wilayah IV (Sulawesi) | 9 | Kawasan Perdesaan Minapolitan 'Manakarra Berdaya | Ikan, Kakao dan Pariwisata | Mamuju | 1 | Tadui | KEP.BUP NOMOR : 188.45/378/KPTS/VI/2017 | KEP.BUP NOMOR : 188.45/377/KPTS/VI/2017 | | Minapolitan 'Manakarra Berdaya |
| | | | | | Kaluku | 2 | Kaluku Barat | | | | |
| | | | | | | 3 | Beru-Beru | | | | |
| | | | | | | 4 | Kabuloang | | | | |
| | | | | | | 5 | Belang-Belang | | | | |
| | | | | | Papalang | 6 | Papalang | | | | |
| | | | | | | 7 | Toaboa | | | | |

| KABUPATEN/ PROVINSI/ KPPN/ WILAYAH | | NAMA KAWASAN | | POTENSI | KECAMATAN | DESA | SK KAWASAN | SK TKPKP | PERBUP RPKP | BUMDES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 8 Topore | | | | |
| | | | | | Sampaga | 9 Bunde | | | | |
| | | | | | | 10 Sampaga | | | | |
| | | | | | | 11 Tarailu | | | | |
| | | | | | | 12 Losso | | | | |
| | | | | | | 13 Kaloding | | | | |
| | | | | | | 14 Kel. Sinyonyoi Selatan | | | | |
| | | | | | | 15 Kelurahan Bebangga | | | | |
| | | | | | | 16 Kelurahan Sinyonyoi | | | | |
| 10 | Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara KPPN Raha Wilayah IV (Sulawesi) | 10 | Kawasan Perdesaan Kontunaga Bakati | Biji Mete dan jagung | Kontunaga | 1 Mabodo | PERBUP NOMOR 24 TAHUN 2017 | PER.BUP NOMOR 657 TAHUN 2017 DAN KEP.BUP NOMOR 560 TAHUN 2017 | | Kontunaga Bakati |
| | | | | | | 2 Kontunaga | | | | |
| | | | | | | 3 Bungi | | | | |
| | | | | | | 4 Lapodidi | | | | |
| | | | | | | 5 Liabalano | | | | |
| | | | | | | 6 Masalili | | | | |
| 11 | Kota Jayapura Provinsi Papua KPPN Arso Wilayah V Papua | 11 | Kawasan Perikanan, Pariwisata dan Perkebunan | Wisata Alam | Muara Tami | 1 Holtekam | KEP.WALIKOTA JAYAPURA NOMOR: 191 TAHUN 2017 | SK WALIKOTA NOMOR 202 TAHUN 2016 | PERWALKOT NO 44 TAHUN 2017 | Jopalala |
| | | | | | | 2 Skow Yambe | | | | |
| | | | | | | 3 Skow Mabo | | | | |
| | | | | | | 4 Skow Sae | | | | |
| 12 | Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat KPPN Manokwari Wilayah V (Papua) | 12 | Kawasan Agropolitan Sidey | Kakao | Sidey | 1 Kaironi | KEPBUP.NOMOR 414/340/10/2017 | KEPBUP.NO. 414/382/12/2017 | PERBUP NOMOR 113 TAHUN 2017 | Agropolitan Sidey |
| | | | | | | 2 Sidey | | | | |
| | | | | | | 3 Waramoi | | | | |
| | | | | | | 4 Kassi | | | | |
| | | | | | | 5 Saray | | | | |
| | | | | | | 6 Sidey Baru | | | | |
| | | | | | | 7 Sidey Makmur | | | | |
| | | | | | | 8 Meyof I | | | | |
| | | | | | | 9 Wariki | | | | |
| | | | | | | 10 Wamnowi | | | | |
| | | | | | | 11 Manggupi | | | | |
| | | | | | | 12 Sidey Jaya | | | | |

## Lampiran 4. Bantuan Program Pengembangan Inkubator Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Pi Prukades) Tahun 2017

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Nama Bum Desa Bersama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | Aceh Timur | Idi Rayeuk | 1. Gampong Jawa | Minapolitan Jaya |
| | | | | 2. Gampong Blang Geulumpang | |
| | | | | 3. Gampong Kuala Idi | |
| | | | | 4. Gampong Keutapang Mameh | |
| | | | | 5. Gampong Baroe | |
| 2 | Lampung | Lampung Timur | Pasir Sakti | 1. Desa Pasir Sakti | Cipta Bersama |
| | | | | 2. Desa Mulyosari | |
| | | | | 3. Desa Mekarsari | |
| | | | | 4. Desa Purworejo | |
| | | | | 5. Desa Rejomulyo | |
| | | | | 6. Desa Kedung Ringin | |
| | | | | 7. Desa Labuhan Ratu | |
| | | | | 8. Desa Sumur Kucing | |
| 3 | Jawa Tengah | Kebumen | Karangsambung | 1. Desa Wadasmalang | Bumi Dewandoro |
| | | | | 2. Desa Pujotirto | |
| | | | | 3. Desa Plumbon | |
| | | | | 4. Desa Widoro | |
| | | | | 5. Desa Kedungwaru | |
| | | | | 6. Desa Seling | |
| | | | | 7. Desa Pencil | |
| | | | | 8. Desa Kaligending | |
| | | | | 9. Desa Langse | |
| | | | | 10. Desa Kalisana | |
| | | | | 11. Desa Tlepok | |
| | | | | 12. Desa Banioro | |
| | | | | 13. Desa Totogan | |
| | | | | 14. Desa Karangsambung | |
| | | Pati | Juwana | 1. Desa Bajomulyo | Juwana Makmur Sejahtera |
| | | | | 2. Desa Dukutalit | |
| | | | | 3. Desa Doropayung | |
| 4 | Jawa Timur | Malang | Poncokusumo | 1. Desa Pandasari | Kusuma Sejahtera |
| | | | | 2. Desa Ngadireso | |
| | | | | 3. Desa Dawuhan | |
| | | | | 4. Desa Sumberejo | |
| | | Ponorogo | Pudak | 1. Desa Banjarejo | Pudak Segar Abadi |
| | | | | 2. Desa Bareng | |
| | | | | 3. Desa Krisik | |
| | | | | 4. Desa Pudak Kulon | |
| | | | | 5. Desa Pudak Wetan | |
| | | | | 6. Desa Tambang | |
| | | Trenggalek | Bendungan | 1. Desa Dompyong | Wilis Sejahtera |
| | | | | 2. Desa Botoputih | |
| | | | | 3. Desa Surenlor | |
| | | | | 4. Desa Masaran | |
| | | | | 5. Desa Sumurup | |
| | | | | 6. Desa Sengon | |
| | | | | 7. Desa Srabah | |
| | | | | 8. Desa Depok | |
| | | Blitar | Udanawu | 1. Desa Ringin Anom | Karya Manunggal |

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Nama Bum Desa Bersama |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2. Desa Karanggondang | |
| | | | | 3. Desa Sumbersari | |
| | | | | 4. Desa Mangunan | |
| | | | | 5. Desa Slemanan | |
| | | | | 6. Desa Sukorejo | |
| | | | | 7. Desa Bendorejo | |
| | | | | 8. Desa Bakung | |
| | | | | 9. Desa Tunjung | |
| | | | | 10. Desa Besuki | |
| | | | | 11. Desa Temenggunang | |
| | | | | 12. Desa Jati | |
| 5 | Nusa Tenggara Barat | Sumbawa | Utan | 1. Desa Sabeno | Jasaprima |
| | | | | 2. Desa Motong | |
| | | | | 3. Desa Tengah | |
| | | | | 4. Desa Orong Bawa | |
| | | | | 5. Desa Stowe Brang | |
| | | Lombok Tengah | Kopang | 1. Desa Aik Bual | Bao Daye |
| | | | | 2. Desa Wajageseng | |
| | | | | 3. Desa Lendang Ara | |
| | | | | 4. Desa Bebuak | |
| | | | | 5. Desa Montong Gamang | |
| | | | | 6. Desa Semparu | |
| | | | | 7. Desa Dasan Baru | |
| | | | | 8. Desa Muncan | |
| | | | | 9. Desa Monggas | |
| | | | | 10. Desa Darmaji | |
| 6 | Kalimantan Selatan | Hulu Sungai Selatan | Sungai Raya | 1. Desa Imlasah Hilir | Berdikari Bersama |
| | | | | 2. Desa Imlasah Tengah | |
| | | | | 3. Desa Kapuh | |
| | | | | 4. Desa Karasikan | |
| | | | | 5. Desa Telaga Bidadari | |
| | | | | 6. Desa Hamalau | |
| | | | | 7. Desa Sungai Raya Utara | |
| 7 | Sulawesi Tengah | Sigi | Sigi Biromaru | 1. Desa Bora | Magaya Pura |
| | | | | 2. Desa Watunonju | |
| | | | | 3. Desa Oloboju | |
| | | | | 4. Desa Sidera | |
| | | | | 5. Desa Soulowe | |
| | | | | 6. Desa Jowo Oge | |
| | | | | 7. Desa Pombewe | |
| 8 | Maluku | Maluku Tengah | Seram Utara Timur Kobi | 1. Desa Samol | Bina Usaha |
| | | | | 2. Desa Waiasih | |
| | | | | 3. Desa Waimusi | |
| | | | | 4. Desa Morokai | |
| | | | | 5. Desa Marasatwa | |
| | | | | 6. Desa Leaway | |
| | | | | 7. Desa Waitompa | |
| 9 | Maluku Utara | Halmahera Timur | Maba Tengah | 1. Desa Beringin Lamo | Sumber Jaya |
| | | | | 2. Desa Babasaram | |
| 10 | Papua Barat | Raja Ampat | Meosmansar | 1. Desa Sawinggrai | Meosmansar |
| | | | | 2. Desa Yen Waupnor | |
| | | | | 3. Desa Yen Buba | |
| | | | | 4. Desa Arborek | |

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Nama Bum Desa Bersama |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5. Desa Sawandarek | |
| **Total** | **10** | **15** | **15** | **103** | **15** |

## Lampiran 5. Bantuan Pembangunan Pasar Kawasan di 13 Lokasi

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Bum Desa Bersama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | Aceh Tengah | Kebayakan | Jongok Meluem | Sara Pakat |
| 2 | Sumatera Selatan | Muara Enim | Lubai | Beringin | Lubai Bersatu |
| 3 | Lampung | Lampung Timur | Pasir Sakti | Kedung Ringin | Cipta Bersama |
| 4 | Jawa Tengah | Brebes | Jatibarang | Kebonagung | Maju Bersama |
| | | Cilacap | Gandrungmangu | Layansari | Karya Satria |
| | | Demak | Mranggen | Waru | Berkah Jaya |
| | | Jepara | Kembang | Pendem | Sido Makmur |
| | | Blora | Jepon | Puledagel | Sumber Makmur |
| 5 | Jawa Timur | Magetan | Sidorejo | Campursari | Selo Asri |
| | | Tulungagung | Ngantru | Srikaton | Katon Joyo |
| 6 | Kalimantan Utara | Nunukan | Sei Menggaris | Tabur Lestari | Sinar Sei Menggaris |
| 7 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Utara | Pemenang | Pemenang Timur | Pemenang |
| 8 | Nusa Tenggara Timur | Sumba Barat Daya | Wewewa Timur | Kalembu Ndara Mane | Maju Bersama |
| **Total** | **8** | **13** | **13** | **13** | **13** |

## Lampiran 6. Bantuan Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) Berbasis Usaha Bersama Komunitas (UBK) Tahun 2017

| NO | PROVINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | DESA | NAMA BUM DESA BERSAMA | NAMA UNIT USAHA | JENIS PRODUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulawesi Tengah | Buol | Bukal | 1. Rante Maranu<br>2. Winangun | Berkah | UBK Karya Usaha | Keripik Jagung |
| 2 | Kalimantan Barat | Kapuas Hulu | Hulu Gurung | 1. Nanga Tepuai<br>2. Lubuk Antuk | Tepuai Bersatu | UBK Sejahtera Bersama | Kerupuk Ikan |
| 3 | Nusa Tenggara Barat | Lombok Barat | Lembar | 1. Sekotong Timur<br>2. Labuan Tereng | Sejahtera Bersama | UBK Hikmah Sejahtera | Kerupuk Ikan |
| 4 | Jawa Timur | Jombang | Jombang | 1.Denanyar<br>2. Banjardowo | Anyardowo | UBK Den Banjar | Keripik Pisang |
| | | Malang | Sumberpucung | 1. Sumberpucung<br>2. Karangkates | Sumber Pucung Mandiri | UBK Rakyat Bersatu | Jahe Instan |
| | | Gresik | Tambak | 1. Sukaoneng<br>2. Pekalongan | Ekaontong | UBK Al Kautsar | Kripik Sukun |
| | | Banyuwangi | Genteng | 1. Setail<br>2. Kembiritan | Langgeng Abadi | UBK Raudhatut Tholabah | Mebeller |
| | | Tuban | Montong | 1. Jetak<br>2. Guwoterus | Jago | UBK Chasanah | Pakaian Jadi |
| | | Kediri | Mojo | 1. Ploso<br>2. Maesan | Plasma Bersama | UBK Plasma Queen | Keripik Singkong |
| | | Jember | Ajung | 1. Klompangan<br>2. Ajung | Anugrah | UBK Sejahtera Bersama | Kopi Bubuk |
| 4 | Jawa Timur | Nganjuk | Patianrowo | 1. Pakuncen<br>2. Patianrowo | Rowo Asri | UBK Al-Qomar Pantes | Keripik Jagung |
| | | Mojokerto | Puri | 1. Medali<br>2. Mlaten | Makmur Bersama | UBK Santri | Sandal |
| 5 | Jawa Tengah | Temanggung | Jumo | 1. Padureso<br>2. Sukomarto | Jas Hijau | UBK Minna | Kopi Bubuk |
| | | Purba Lingga | Buka Teja | 1. Kembangan<br>2. Cipawon | Mantra | UBK Cipakembangsari | Keripik Pisang |
| | | Klaten | Karangnongko | 1. Demakijo<br>2. Jagalan | Lohjinawi | UBK Al Barokah | Pakaian Jadi |

| NO | PROVINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | DESA | NAMA BUM DESA BERSAMA | NAMA UNIT USAHA | JENIS PRODUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Magelang | Srumbung | 1. Srumbung<br>2. Sudimoro | Sedulur Makmur | UBK Sedulur Makmur | Kripik Salak |
| | | Brebes | Sirampog | 1. Benda<br>2. Kaliloka | Berkah Jaya | UBK Wicaksana | Gula Semut |
| | | Demak | Mranggen | 1. Candisari<br>2. Karangsono | Sumber Rejeki | UBK Al-Ma'ruf | Pemotongan Plastik |
| 6 | Jawa Barat | Cianjur | Cianjur | 1. Nagrak<br>2. Limbangansari | Nagasari | UBK Sinar Terang | Emping Melinjo |
| | | Cirebon | Astana Japura | 1. Mertapada Kulon<br>2. Mertapada Wetan | Mertapada Mandiri | UBK Bina Umat Sejahtera As-Syakiroh | Mebeller |
| | | Garut | Peundeuy | 1. Peundeuy<br>2. Toblong | Nurul Huda Ii | UBK Nurul Huda Ii | Gula Semut |
| | | Tasikmalaya | Salopa | 1. Mandalaguna<br>2. Mandalahayu | Guna Rahayu | UBK Hikmah Mandala | Pakaian Jadi |
| 6 | Jawa Barat | Bandung Barat | Cipongkor | 1. Girimukti<br>2. Cijenuk | Barokah | UBK Sakinah | Keripik Pisang |
| | | Purwakarta | Wanayasa | 1. Wanasari<br>2. Legokhuni | Maju Jaya Bersama | UBK Maju Sejahtera | Mping Mlinjo |
| | | Karawang | Telukjambe Timur | 1. Pinayungan<br>2. Telukjambe | Telukjambe Timur Sejahtera | UBK Rancage Sejahtera | Keripik Pisang |
| | | Bekasi | Pebayuran | 1. Karangharja<br>2. Karanghaur | Haur Harja Sejahtera | UBK Berkah Bersama | Kerupuk Ikan |
| | | Subang | Blanakan | 1. Rawameneng<br>2. Cilamaya Girang | Berkah Selamat | UBK Berkah Bersama | Krispi Ikan Lapan |
| | | Indramayu | Cikedung | 1. Loyang<br>2. Amis | Karya Santri Mandiri | UBK Karya Santri Mandiri | Keripik Singkong |
| 7 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bantul | Sewon | 1. Pendowo Harjo<br>2. Panggungharjo | Jaya Bersama | UBK Pesantren Preneur | Keripik Pisang |
| 8 | Banten | Pandeglang | Cimanggu | 1. Ciburial<br>2. Cijaralang | Jaya Abadi | UBK Jaya Abadi | Gula Merah |
| | | | | | | | |
| **Total** | **8** | **30** | **30** | **60** | | **30** | **30** |

**Lampiran 7 . Data Lokasi Bantuan Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2017**

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa Titik Lokasi Kegiatan | Desa Anggota BUMDesa Bersama | BUMDesa Bersama | Kawasan Perdesaan | Kegiatan | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Perikanan | Pertanian dan Peternakan | Pari-wisata | |
| 1. | Aceh | 1. Aceh Timur | 1. Idi Rayeuk | 1. Keutapang Mameh | 1. Keutapang Mameh<br>2. Jawa<br>3. Blang Geulumpang<br>4. Baro<br>5. Kuala | 1. Minapolitan | Kawasan Perdesaan Minapolitan Idi Rayeuk | Bantuan Pembangunan Pabrik Es Mini | | | LOKPRI 2017, RA-PKP |
| 2. | Sumatera Utara | 2. Samosir | 2. Harian | 2. Tanah Parripean Kenegerian | 6. Turpuk Sagala<br>7. Turpuk Limbang<br>8. Turpuk Malau<br>9. Turpuk Sihotang<br>10. Sosor Dolok<br>11. Janji Martahan | 2. Sukses Jaya | | Bantuan Penambahan Pakan Ikan Sarana Pengolahan Pasca Panen Ikan dan Pembangunan Pabrik Pakan Mini | | | |
| | | 3. Humbang Hasundutan | 3. Parlilitan | 3. Sionom Hudon Timur II | 12. Sionom Hundon Timur I<br>13. Sionom Hudon Timur II<br>14. Sionom Hudon Selatan<br>15. Sionom Hudon Utara | 3. Sion | | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | |
| | | 4. Toba Samosir | 4. Porsea | Parparean I<br>Parparean II<br>Patane IV | 16. Parparean I<br>17. Parparean II<br>18. Patane IV | 4. Arael | | | | Pem-bangunan /Pengem-bangan Potensi Pariwisata Terpadu | |
| 3. | | | 5. Sungayang | | 19. Nagari Sungayang | | | | | | |

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa Titik Lokasi Kegiatan | Desa Anggota BUMDesa Bersama | BUMDesa Bersama | Kawasan Perdesaan | Kegiatan | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Perikanan | Pertanian dan Peternakan | Pari-wisata | |
| | | 5. Tanah Datar | | 7. Nagari Sungayang | 20. Nagari Minangkabau | 5. Rangkiang Saiyo | | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | |
| | Sumatera Barat | 6. Pesisir Selatan | 6. Koto XI Tarusan | 8. Sungai Nyalo | 21. Sungai Pinang | 6. Mande Tarusan Jaya | Kawasan Perdesaan Berbasis Industri Pariwisata | | | Pem-bangunan /Pengem-bangan Potensi Pariwisata Terpadu | KPPN (RPJMN) , RA-PKP |
| | | | | | 22. Sungainyalo Mudiak Aia | | | | | | |
| | | | | | 23. Mandeh | | | | | | |
| | | | | | 24. Cerocok Anau Ampang Pulai | | | | | | |
| | | | | | 25. Ampang Pulai | | | | | | |
| | | | | | 26. Pulaukaram Ampang Pulai | | | | | | |
| | | | | | 27. Setara Nanggalo | | | | | | |
| | | | | | 28. Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai | | | | | | |
| | | | | | 29. Duku | | | | | | |
| | | | | | 30. Duku Utara | | | | | | |
| | | | | | 31. Kapuh | | | | | | |
| | | | | | 32. Kapuh Utara | | | | | | |
| | | | | | 33. Batu Hampa | | | | | | |
| | | | | | 34. Nanggalo | | | | | | |
| | | | | | 35. Barung-Barung Belantai | | | | | | |
| | | | | | 36. Barung-Barung Belantai Selatan | | | | | | |
| | | | | | 37. Siguntur | | | | | | |
| | | | | | 38. Siguntur Tua | | | | | | |
| | | | | | 39. Taratak Sei Lundang | | | | | | |
| | | | | | 40. Kampungbaru Korongnan Ampek | | | | | | |

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa Titik Lokasi Kegiatan | Desa Anggota BUMDesa Bersama | BUMDesa Bersama | Kawasan Perdesaan | Kegiatan | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Perikanan | Pertanian dan Peternakan | Pari-wisata | |
| | | | | | 41. Batuhampar Selatan | | | | | | |
| | | | | | 42. Barung-Barung Belantai Timur | | | | | | |
| | | | | | 43. Barung-Barung Belantai Tengah | | | | | | |
| 4. | Lampung | 7. Lampung Timur | 7. Labuhan Maringgai | 9. Srigading | 44. Karya Tani | 7. Gading Rahayu | Kawasan Perdesaan Agrominapolitan-Minapolitan Sukakarya | Bantuan Pembangunan Pabrik Es Mini | | | LOKPRI 2017, RA-PKP |
| | | | | | 45. Karya Makmur | | | | | | |
| | | | | | 46. Bandar Negeri | | | | | | |
| | | | | | 47. Muara Gading Mas | | | | | | |
| | | | | | 48. Maringgai | | | | | | |
| | | | | | 49. Labuhan Maringgai | | | | | | |
| | | | | | 50. Sriminosari | | | | | | |
| | | | | | 51. Srigading | | | | | | |
| | | | | | 52. Margasari | | | | | | |
| | | | | | 53. Karanganyar | | | | | | |
| | | | | | 54. Sukorahayu | | | | | | |
| | | 8. Pesisir Barat | 8. Pesisir Selatan | 10. Tanjung Raya | 55. Bagung Negara | 8. Kalao Salajoran | Minapolitan | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | |
| | | | | | 56. Tanjung Raya | | | | | | |
| 5. | Jambi | 9. Merangin | 9. Jangkat | 11. Muara Madras | 57. Muara Madras | 9. Remah Mentenang | Kawasan Perkebunan Kopi Rakyat | | Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Kopi | | RA-PKP |
| | | | | | 58. Koto Renah | | | | | | |
| | | | | | 59. Lubuk Pungguk | | | | | | |
| | | | | | 60. Pulau Tengah | | | | | | |
| 6 | Banten | 10. Pandeglang | 10. Panimbang | 12. Tanjung Jaya | 61. Citeureup | 10. Citra Jaya | | Bantuan Pem-bangunan Keramba Jaring Apung dan Sarana | | | |
| | | | | | 53. Tanjung Jaya | | | | | | |
| | | | | | 62. Tanjung Jaya | | | | | | |

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa Titik Lokasi Kegiatan | Desa Anggota BUMDesa Bersama | BUMDesa Bersama | Kawasan Perdesaan | Kegiatan | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Perikanan | Pertanian dan Peternakan | Pari-wisata | |
| | | | | | | | | Pendukung Keramba Jaring Apung | | | |
| 7 | Jawa Barat | 11. Purwakarta | 11. Pasawahan | 13. Pasawahan | 63. Cihuni<br>64. Kertajaya<br>65. Cibatu<br>66. Lebak Anyar<br>67. Warungkadu<br>68. Pasawahan<br>69. Pasawahan Kidul<br>70. Margasari | 11. Benteng Kahuripan | Agropolitan | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | |
| | | 12. Karawang | 12. Cilamaya Wetan | 14. Mekarmaya | 71. Mekarmaya<br>72. Cilamaya<br>73. Muara<br>74. Muara Baru<br>75. Sukatani<br>76. Tegalwaru<br>77. Tegalsari<br>78. Cikalong<br>70. Cikarang<br>79. Rawa Gempol Wetan<br>80. Rawa Gempol Kulon<br>81. Sukakerta | 12. Berkah Bersama | Minapolitan | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | |
| | | 13. Bandung | 13. Pangalengan | 15. Margamulya | 82. Margamulya<br>83. Pulosari<br>84. Margaluyu | 13. Saraksa Pangalengan | Agroforestry Kopi | | Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Kopi | | RA-PKP |
| 8 | Jawa Tengah | 14. Karanganyar | 14. Karangpandan | 16. Ngemplak | 85. Ngemplak<br>86. Tohkuning<br>87. Bangsri | 14. Lawu Sejahtera | Kawasan Perdesaan Beras Organik | | Bantuan Sarana Produksi | | RA-PKP |

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa Titik Lokasi Kegiatan | Desa Anggota BUMDesa Bersama | BUMDesa Bersama | Kawasan Perdesaan | Kegiatan | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Perikanan | Pertanian dan Peternakan | Pari-wisata | |
| | | | | | 88. Sewurejo | | | | Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | |
| | | | | | 89. Mojogedang | | | | | | |
| | | | | | 90. Pendem | | | | | | |
| | | | | | 91. Pereng | | | | | | |
| | | | | | 92. Gentungan | | | | | | |
| | | | | | 93. Seloromo | | | | | | |
| | | | | | 94. Balong | | | | | | |
| | | | | | 95. Karangrejo | | | | | | |
| | | | | | 96. Kwadungan | | | | | | |
| | | | | | 97. Kutho | | | | | | |
| | | | | | 98. Gantiwarno | | | | | | |
| | | | | | 99. Ngadiluwih | | | | | | |
| | | 15. Temanggung | 15. Kranggan | 17. Ngropoh | 100. Pendowo | 15. Sugih Waras | | | Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Kopi | | |
| | | | | | 101. Kramat | | | | | | |
| | | | | | 102. Ngropoh | | | | | | |
| | | | | | 102. Purwosari | | | | | | |
| | | | | | 103. Sanggrahan | | | | | | |
| | | 16. Wonogiri | 16. Girimarto | 18. Waleng | 104. Waleng | 16. Lenggar Bujo Giri | Ekonomi Perdesaan Berbasis Pertanian dan Ekowisata | | Pengadaan Sarana Peralatan Pengolah Pakan Ternak | | |
| | | | | 19. Semagar | 105. Semagar | | | | | | |
| | | | | 20. Bubakan | 106. Bubakan | | | | | | |
| | | | | 21. Selorejo | 107. Selorejo | | | | | | |
| | | | | 22. Girimarto | 108. Girimarto | | | | | | |
| | | 17. Purbalingga | 17. Karangreja | 23. Serang | 109. Serang | 17. Seroja | Agrowisata | | | Pembang unan/ Pengem-bangan Potensi Pariwisata Terpadu | |
| | | | | | 110. Karangreja | | | | | | |
| | | 18. Demak | 18. Sayung | 24. Bedono | 111. Bedono | 18. Purwo Moro | | | | Pembang unan/ Pengem- | |
| | | | | | 112. Purwosari | | | | | | |
| | | | | | 113. Morosari | | | | | | |

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa Titik Lokasi Kegiatan | Desa Anggota BUMDesa Bersama | BUMDesa Bersama | Kawasan Perdesaan | Kegiatan | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Perikanan | Pertanian dan Peternakan | Pari-wisata | |
| | | | | | | | | | | bangan Potensi Pariwisata Terpadu | |
| | | 19. Blora | 19. Sambong | 25. Ledok | 114. Ledok<br>115. Sambongrejo<br>116. Jambong<br>117. Giyanti | 19. Wisata Wana Migas | Wanawisata | | | Pembangunan/Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu | Dit. PSDAKP 2017 |
| 9 | DI Yogyakarta | 20. Gunung Kidul | 20. Karangmojo | 26. Karangmojo | 118. Beji Harjo<br>119. Ngawis<br>120. Jatiayu<br>121. Gedangrejo<br>122. Karangmojo<br>123. Ngipak<br>124. Kelor<br>125. Wiladeg<br>126. Bendungan | 20. Makmur | Kawasan Perdesaan Agropolitan Beji Harjo | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | RA-PKP |
| 10 | Jawa Timur | 21. Bojonegoro | 21. Kanor | 27. Tejo<br>28. Cangaan | 127. Tejo<br>128. Cangaan<br>129. Kedungprimpen<br>130. Simorejo<br>131. Samberan<br>132. Semambung<br>133. Sumberwangi<br>134. Gedongarum<br>135. Sarangan | 21. Wahana Karya | | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | |
| | | 22. Nganjuk | 22. Tanjung Anom | 29. Dusun Santren | 136. Dusun Santren<br>137. Malang Sari | 22. Mandiri | Kawasan Perdesaan Kecamatan Sawahan | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan | | |

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa Titik Lokasi Kegiatan | Desa Anggota BUMDesa Bersama | BUMDesa Bersama | Kawasan Perdesaan | Kegiatan | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Perikanan | Pertanian dan Peternakan | Pari-wisata | |
| | | | | | | | | | Pasca Panen Tanaman Padi | | |
| | | 23. Ponorogo | 23. Siman | 30. Ngabar | 138. Ngabar<br>139. Tranjang<br>140. Siman | 23. Anugrah | | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | |
| | | 24. Bondowoso | 24. Sukosari | 31. Sukosari Lor | 141. Sukosari Lor<br>142 Pecalongan<br>143. Kerang<br>144. Nogosari | 24. Sukma Arabika | Agropolitan Kopi | | Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Kopi | | |
| | | 25. Sumenep | 25. Gapura | 32. Baraji | 145. Baraji<br>146. Grujugan | 25. Lancar Jaya | | Bantuan Pem-bangunan Pabrik Es Mini | | | |
| | | 26. Tulung Agung | 26. Sendang | 33. Ngeluruk | 147. Geger<br>148. Ngeluruk<br>149. Sendang<br>150. Nyawangan | 26. Sendang Mulyo | | | | Pembang unan/ Pengemba ngan Potensi Pariwisata Terpadu | |
| | | 27. Malang | 27. Ngantang | 34. Kaumrejo | 151. Kaumrejo<br>152. Sumberagung<br>153. Banturejo<br>154. Mulyorejo | 27. Ngantang Bersinar | | | | Pembang unan/Pen gembanga n Potensi Pariwisata Terpadu | LOKPRI 2017 |
| | | 28. Banyuwangi | 28. Licin | 35. Taman Sari | 155. Taman Sari<br>156. Kluncing | 28. Green Ijen | Kawasan Agrowisata | | Bantuan Sarana dan Prasarana | | RA-PKP |

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa Titik Lokasi Kegiatan | Desa Anggota BUMDesa Bersama | BUMDesa Bersama | Kawasan Perdesaan | Kegiatan | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Perikanan | Pertanian dan Peternakan | Pari-wisata | |
| | | | | | | | | | Produksi dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Kopi | | |
| 11 | Kalimantan Utara | 29. Nunukan | 29. Sebatik Tengah | 36. Sungai Limau | 157. Sungai Limau<br>158. Aji Kuning<br>159. Maspul<br>160. Bukit Harapan | 29. Sebatik Tengah Indah | Kawasan Perdesaan Perkebunan Di Perbatasan Negara | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Kakao | | RA-PKP |
| 12 | Kalimantan Barat | 30. Sintang | 30. Kelam Permai | 37. Kelam Sejahtera | 161. Kebong<br>162. Merpak<br>163. Kelam Sejahtera<br>164. Ensaid Panjang<br>165. Baning Panjang<br>166. Sungai Maram<br>167. Samak | 30. Klutap Bersatu | Agrowisata dan Budaya | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | KPPN (RPJMN) |
| | | 31. Kapuas Hulu | 31. Jongkong | 38. Jongkong Kiri Hulu | 168. Bontai<br>169. Ujung Said<br>170. Nanga Temenang<br>171. Jongkong Kiri Hulu<br>172. Jongkong Kiri Hilir<br>173. Jongkong Pasar<br>174. Jongkong Kanan<br>175. Ujung Jambu<br>176. Jongkong Kiri Tengah<br>177. Jongkong Tanjung<br>178. Kandung Suli<br>179. Penepian Raya<br>180. Karya Baru<br>181. Nanga Serian | 31. Mitra Senara | Minapolitan | Bantuan Penambahan Pakan Ikan Sarana Pengolahan Pasca Panen Ikan dan Pem-bangunan Pabrik Pakan Mini | | | |

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa Titik Lokasi Kegiatan | Desa Anggota BUMDesa Bersama | BUMDesa Bersama | Kawasan Perdesaan | Kegiatan | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Perikanan | Pertanian dan Peternakan | Pari-wisata | |
| 13 | Kalimantan Selatan | 32. Hulu Sungai Selatan | 32. Simpur<br>33. Sungai Raya | 39. Kapuh | 182. Kapuh<br>183. Wasah Hilir<br>184. Wasah Tengah<br>185. Hamalau<br>186. Karisikan<br>187. Sungai Raya Utara<br>188. Telaga Bidadari | 32. Berdikari Bersama | Sentra Makanan Ringan | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | LOKPRI 2017, RA-PKP |
| 14 | Kalimantan Tengah | 33. Kotawaringin Barat | 34. Kumai | 40. Kubu | 189. Kubu<br>190. Sungai Bakau<br>191. Teluk Bogam<br>192. Keraya<br>193. Sabuai Timur<br>194. Sabuai | 33. Kumai Bersatu | Agromina Wisata | Bantuan Penambahan Pakan Ikan Sarana Pengolahan Pasca Panen Ikan dan Pem-bangunan Pabrik Pakan Mini | | | |
| 15 | Sulawesi Tenggara | 34. Konawe Selatan | 35. Kolono Timur | 41. Lambangi | 195. Rambu-Rambu<br>196. Lambangi<br>197. Tumbu-Tumbu Jaya<br>198. Ngapawali<br>199. Batu Putih<br>200. Rumba-Rumba<br>201. Ampera<br>202. Amolengu<br>203. Ulunese<br>204. Langgapulu<br>205. Roda<br>206. Lamapu<br>207. Miletumbo | 34. Tumbuh Lestari | | Bantuan Pem-bangungan Keramba Jaring Apung | | | KPPN (RPJMN), RA-PKP |
| 16 | Sulawesi Tengah | 35. Tojo Una Una | 36. Tojo | 42. Pancuma | 208. Podi<br>209. Tongku<br>210. Pancuma | 35. Sumber Berkah | | Bantuan Pembanguna | | | |

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa Titik Lokasi Kegiatan | Desa Anggota BUMDesa Bersama | BUMDesa Bersama | Kawasan Perdesaan | Kegiatan | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Perikanan | Pertanian dan Peternakan | Pari-wisata | |
| | | | | | 211. Tojo | | | n Pabrik Es Mini | | | |
| | | 36. Donggala | 37. Balaesang | 43. Tambu | 212. Meli<br>213. Siweli<br>214. Tambu<br>215. Tovia Tambu<br>216. Mapane Tambu | 36. Uwempane | Agrowisata Makeng Tana Bailo Berbasis Produk Pangan Sehat | Bantuan Pembangunan Pabrik Es Mini | | | RA-PKP |
| | | 37. Poso | 38. Pamona Puselemba | 44. Tonusu | 216. Wera<br>217. Leboni<br>218. Tonusu<br>219. Buyumpondoli<br>220. Peura | 37. Lemba Mesale | Agrowisata Lemba Masale Berbasis Produk Pangan Sehat | | | Pembangunan/Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu | RA-PKP |
| | | | | 45. Wera | 221. Wera<br>222. Leboni<br>223. Tonusu<br>224. Buyumpondoli<br>225. Peura | | | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | |
| | | 38. Buol | 39. Tiloan | 46. Panilan Jaya | 226. Panilan Jaya<br>227. Lomuli | 38. Usaha Bersama | Agropolitan Lipunoto | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | KPPN (RPJMN), RA-PKP |
| | | 39. Sigi | 40. Sigi Biromaru | 47. Pombewe | 228. Bora<br>229. Watunonju<br>230. Oloboju<br>231. Soulowe<br>232. Sidera<br>233. Jono Oge<br>234. Pombewe | 39. Magaya Pura | Agrowisata Magaya | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | LOKPRI 2017, RA-PKP |
| 17 | | 40. Pinrang | 41. Suppa | 48. Tasiwalie | 235. Tasiwalie | | Minapolitan Luwita | | | | |

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa Titik Lokasi Kegiatan | Desa Anggota BUMDesa Bersama | BUMDesa Bersama | Kawasan Perdesaan | Kegiatan | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Perikanan | Pertanian dan Peternakan | Pari-wisata | |
| | Sulawesi Selatan | | | | 236. Wiringtasi<br>237. Lero<br>238. Ujung Labung | 40. Luwita Bahari | | Bantuan Penambahan Pakan Ikan Sarana Pengolahan Pasca Panen Ikan dan Pembangunan Pabrik Pakan Mini | | | KPPN (RPJMN), RA-PKP |
| | | 41. Bone | 42. Cenrana Tellusiattinge | 49. Latomro | 239. Latomro<br>240. Laoni<br>241. Panyiwi<br>242. Lamuru<br>243. Mattoanging | 41. Mallusetasi | | Bantuan Penambahan Pakan Ikan Sarana Pengolahan Pasca Panen Ikan dan Pembangunan Pabrik Pakan Mini | | | RA-PKP |
| | | 42. Bantaeng | 43. Uluere | 50. Bonto Lojong | 244. Bonto Lojong | 42. Loka | Agrowisata Loka | | | Pembangunan/Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu | RA-PKP |
| | | | | 51. Bonto Marannu | 245. Bonto Marannu<br>246. Bonto Daeng<br>247. Bonto Tallasa<br>248. Bonto Rannu<br>249. Bonto Ireng | | | | | | |
| | | 43. Barru | 44. Barru<br>45. Balusu | 52. Anabanua | 250. Anabanua<br>251. Galung<br>252. Palakka<br>253. Tompo<br>254. Kamiri<br>255. Madello<br>256. Binuang | 43. Pitu Wanua | Kawasan Peternakan Sapi Padang Loang | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | RA-PKP, KPPN (RPJMN) |
| | | 44. Luwu | 46. Lamasi | | 257. Padang Kalua | 44. Sehati | | | | | |

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa Titik Lokasi Kegiatan | Desa Anggota BUMDesa Bersama | BUMDesa Bersama | Kawasan Perdesaan | Kegiatan | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Perikanan | Pertanian dan Peternakan | Pari-wisata | |
| | | | | 53. Padang Kalua | 258. Wiwitan<br>259. Wiwitan Timur<br>260. Se'pong<br>261. Setiarejo<br>262. Pongsamelung<br>263. Awo Gading<br>264. Ta'pongo<br>265. Salu Jambu | | | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | |
| 18 | Sulawesi Barat | 45. Mamuju Tengah | 47. Topoyo | 54. Tabolang | 266. Tabolang<br>267. Saluleho<br>268. Tangkou | 45. Kallando Bersatu | Wisata Terpadu Tambunong | | | Pembangunan/Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu | |
| 19 | Gorontalo | 46. Gorontalo Utara | 48. Sumalata Timur | 55. Motihelumo | 269. Motihelumo<br>270. Wubudu<br>271. Bubalango<br>272. Buladu<br>273. Buluwatu<br>274. Deme I<br>275. Deme II<br>276. Dulukapa<br>277. Hulawa<br>278. Koluwoka | 46. Permata | | Bantuan Pembangunan Pabrik Es Mini | | | |
| 20 | Maluku Utara | 47. Halmahera Barat | 49. Jailolo | 56. Saria | 279. Saria<br>280. Bobo<br>281. Bobo Jiko | 47. Soa Romdidi | | Bantuan Pembangunan Pabrik Es Mini | | | |
| | | 48. Halmahera Timur | 50. Wasile | 57. Baturaja | 282. Baturaja<br>283. Bulapapo<br>284. Bumi Restu<br>285. Cemara Jaya<br>286. Subaim<br>287. Waisuba | 48. | | Bantuan Pembangunan Pabrik Es Mini | | | LOKPRI 2017 |

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa Titik Lokasi Kegiatan | Desa Anggota BUMDesa Bersama | BUMDesa Bersama | Kawasan Perdesaan | Kegiatan | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Perikanan | Pertanian dan Peternakan | Pari-wisata | |
| 21 | Maluku | 49. Maluku Tengah | 51. Seram Utara Timur Kobi | | 288. Waimusi<br>289. Waiasih<br>290. Marasahua<br>291. Kobi<br>292. Leaway<br>293. Samal<br>294. Witonipa<br>295. Morokai<br>296. Sariputih<br>297. Kabuhari | 49. Bina Usaha | | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | LOKPRI 2017, KPPN (RPJMN), RA-PKP |
| | | 50. Maluku Tenggara | 52. Kei Kecil<br>53. Manyeuw<br>54. Kei Kecil Barat | 58. Ngilngof | 298. Ngilngof<br>299. Sathean<br>300. Rumah Dian<br>301. Tanimbar Kei<br>302. Ohoi Llir<br>303. Debut | 50. Maren | | | | Pembangunan/Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu | |
| 22 | Papua Barat | 51. Sorong | 55. Malabotom | 59. Malasigit | 304. Malajapa<br>305. Malasigit<br>306. Malamoja<br>307. Maqotarum<br>308. Tanah Tinggi<br>309. Klagulu<br>310. Marikmay<br>311. Qlamuqum<br>312. Klasmam | 51. Newilik | | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | |
| | | 52. Raja Ampat | 56. Meos Mansar | 60. Sawinggrai | 313. Arborek<br>314. Yenbuba<br>315. Yen Waufnor<br>316. Sawandarek<br>317. Sawinggrai | 52. Manswar | Strategis Pariwisata | | | Pembangunan/Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu | LOKPRI 2017, RA-PKP |
| 23 | NTB | 53. Bima | 57. Bolo | 61. Gembe | 318. Timu<br>319. Leu<br>320. Bontokape | 53. Sama Karawi | | | Bantuan Sarana Produksi | | |

| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Desa Titik Lokasi Kegiatan | Desa Anggota BUMDesa Bersama | BUMDesa Bersama | Kawasan Perdesaan | Kegiatan | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Perikanan | Pertanian dan Peternakan | Pari-wisata | |
| | | | | | 321. Kancoa Rida | | | | Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | |
| | | 54. Sumbawa | 58. Utan | 62. Motong | 322. Sabedo | 54. Jasa Prima | Kawasan Jasa Prima | | Pengadaan Sarana Peralatan Pengolah Pakan Ternak | | LOKPRI 2017, KPPN (RPJMN), RA-PKP |
| | | | | | 323. Stawebrang | | | | | | |
| | | | | | 324. Tengah | | | | | | |
| | | | | | 325. Motong | | | | | | |
| | | | | | 326. Orong Bawak | | | | | | |
| | | 55. Lombok Timur | 59. Aikmel | 63. Aikmel Utara | 326. Aikmel Utara | 55. Patih Monggoq | | | Bantuan Sarana Produksi Pertanian dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Padi | | RA-PKP |
| | | | | | 327. Aik Trape | | | | | | |
| | | | | | 328. Kembang Kerang | | | | | | |
| | | | | | 329. Kembang Kerangdaya | | | | | | |
| | | | | | 330. Lenek Duren | | | | | | |
| | | | | | 331. Toya | | | | | | |
| 24 | NTT | 56. Ngada | 60. Bajawa | 64. Were Satu | 332. Ngoronale | 56. Wolo Lima | Agrowisata | | Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi dan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Kopi | | RA-PKP |
| | | | | | 333. Beiwali | | | | | | |
| | | | | | 334. Lanza Gedha | | | | | | |
| | | | | | 335. Bajawa | | | | | | |
| | | | 61. Golewa | | 336. Were I | | | | | | |
| | | | | | 337. Radabata | | | | | | |
| | | | | | 338. Dadawea | | | | | | |
| | | | 62. Wolo Lima | | 339. Mangulewa | | | | | | |
| | | | | | 340. Turekisa | | | | | | |
| | | | | | 341. Rakalaba | | | | | | |
| | | | | | 342. Rakateda II | | | | | | |